

**PERANAN PT. PEGADAIAN (PERSERO) CAB. TAKALAR DALAM  
MENINGKATKAN EKONOMI UMMAT DI KAB. TAKALAR**



**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi  
Islam (SEI) Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN  
Alauddin makassar.*

Oleh  
**ROSDIANA**  
**10200108061**

**JURUSAN EKONOMI ISLAM  
FAKULTAS SYUARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI MAKASSAR.**

**2012**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Penyusunan skripsi yang berjudul Peranan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Takalar dalam Meningkatkan Perekonomian Ummat di Kabupaten Takalar. menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 24 Oktober 2012

**Penulis,**

**Rosdianan**

**NIM. 10200108061**



## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara **St.chadijah** NIM: 10200108065, Mahasiswa Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul “PENGARUH STRUKTUR ORGANISASI DALAM PENINGKATAN KINERJA KARYAWAN PADA PT.BANK SULSELBAR SYARIAH CABANG MAKASSAR”, memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui dan diajukan ke sidang Munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses selanjutnya.

Makassar, 23 Maret 2013

Mengetahui

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr.h. Muslimin. Kara. S.Ag. M.Ag  
NIP. 1964060119931003

Rika Dwi Parmitasari. SE.M.Com  
NIP. 197804272008012026

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbil'alamin segala puji hanya milik Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang senantiasa dicurahkan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini hingga selesai. Salam dan shalawat senantiasa penulis haturkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu' Alaihi Wasallam sebagai satu-satunya uswa dan qudwah, petunjuk jalan kebenaran dalam menjalankan aktivitas keseharian kita.

Dalam kesempatan ini penulis ingin menghaturkan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kedua orang tuaku yang tercinta ayahanda **Ma'rewasang** dan ibunda . **Sanneng**, atas kasih sayang, bimbingan, nasehat, pengorbanan dan doa yang tiada henti, semuanya tidak akan bisa tergantikan dengan apapun di dunia ini, semoga Allah senantiasa menjaga, menyayangi dan memberi petunjukNya kepada kalian.

Penulis juga menyadari tanpa adanya bantuan dan partisipasi dari berbagai pihak, skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan seperti yang diharapkan. Oleh karena itu penulis patut menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor UIN Alauddin Makassar Prof. Dr. H. A. Kadir Gassing H. T., M. S., dan para Pembantu Rektor UIN Alauddin Makassar.
2. Prof.Dr. H. Ali Parman, M.A., Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar serta para Pembantu Dekan

3. Dr. H. Muslimin Kara, M.Ag dan Rahmawati Muin, S.Ag.,M.Ag. masing-masing Selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Ekonomi Islam.
4. Drs. Mukhtar Lutfi M.Pd dan Amiruddin K,S.Ag.M.E selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang dengan ikhlas banyak meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis hingga terwujudnya skripsi ini.
5. Para dosen serta pegawai dalam lingkup Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan bantuan, bimbingan dan ilmu pengetahuan selama penulis menempuh pendidikan.
6. Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Cabang Takalar, beserta para karyawannya yang memberikan izin dan fasilitas kepada penulis untuk membuat skripsi ini sehingga skripsi ini dapat selesai.
7. Teman-teman seperjuanganku *The Islamic Economic* 2008 Sukriani, Sukmawati, Wisda Sopalatu, Rasni Rasyid serta rekan-rekan mahasiswa Jurusan Ekonomi Islam Angkatan 2008 yang tidak disebut satu per satu, yang telah menemani penulis menjalani suka duka dunia kampus.
8. Serta seluruh teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) UIN Alauddin Makassar Angkatan ke-47 Desa Bunga Ejaya Kec. Pallangga Kab.Goa.
9. Rakhmi Nur Amalia, Suhayani dan Sitti Khadija, Irma Suriani, makasih atas bantuan kebersamaannya selama ini hingga penulis dapat menyelesaikan

studinya di UIN Alauddin Makassar Jurusan Ekonomi Islam. Kalian adalah teman terbaikku yang tidak akan pernah saya lupakan.

10. Kemudian kepada Agusri Spd.I teman sahabat sekaligus pembimbing dan penasehat pribadi, yang tidak pernah bosan memberikan semangat, dan memotivasi penulis mengucapkan banyak-banyak terimakasih karena dorongan dan nasehat-nasehat anda penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
11. Hamrianto, Lisnawati, M. Saenal Saudara-saudara ku dan Pihak-pihak yang telah membantu penulis yang karena keterbatasan tempat pada skripsi sederhana ini sehingga saya tidak dapat tulis satu persatu.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati dan penuh harapan, semoga skripsi ini dapat memberikan maslahat bagi semua pihak, terutama untuk penulis sendiri.

Makassar, Desember 2012  
Penulis,



**Rosdiana**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
ABSTRAK.....	xi
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Pengertian Judul.....	8
D. Kajian Pustaka.....	10
E. Garis-Garis Besar Isi Skripsi.....	11
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	 13
A. Pengertian, Manfaat dan Tujuan Gadai.....	13
B. Ekonomi Ummat.....	18
C. PP Tentang Pegadaian .....	22
D. Pegadaian dalam Konsep Fiqih.....	31
E. Pegadaian dalam Konsep Ekonomi.....	33
 BAB III METODELOGI PENELITIAN.....	 36

A. Jenis Penelitian.....	36
B. Teknik Penentuan Lokasi.....	36
C. Metode Pendekatan.....	36
D. Metode Pengumpulan Data.....	37
E. Metode Pengolahan Data.....	41
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>43</b>
A. Gambaran Umum PT. Pegadaian Cab. Takalar.....	43
1. Sejarah Umum PT. Pegadaian.....	43
2. Struktur Organisasi PT. Pegadaian.....	46
3. Tugas dan Fungsi Keorganisasian.....	48
B. Hasil Penelitian di PT. Pegadaian (Persero) Cab. Takalar.....	50
1. Peran PT. Pegadaian dalam Meningkatkan Perekonomian umat di Kab. Takalar. ....	50
2. Faktor-Faktor yang Mendorong dan Menghambat Pegadaian dalam Meningkatkan Perekonomian di Kab. Takalar.....	56
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>66</b>
A. Kesimpulan .....	66
B. Saran .....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>69</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data Statistik Perusahaan (Kredit).....	61
Tabel 1.2	Data Statistik Perusahaan (Pelunasan) .....	62
Tabel 1.3	Data Statistik Perusahaan (Pelelangan).....	63
Tabel 1.4	Data Statistik Perusahaanj (Sisa yang Belum di Tebus)...	63
Tabel 1.5	Data Statistik Perusahaan (Rekapitulasi Perbandingan dari Tahun 2006-2011) .....	64



## ABSTRAK

**Nama Penyusun : Rosdiana**

**Nim : 10200108061**

**Judul Skripsi : “Peranan PT. Pegadaian (Persero) Cab. Takalar dalam Meningkatkan Perekonomian Ummat di Kab. Takalar.”**

---

Skripsi ini berjudul “Peranan PT. Pegadaian (Persero) Cab. Takalar dalam Meningkatkan Perekonomian Ummat di Kab. Takalar”. Gadai (al-rahṇ) adalah sebuah akad utang piutang yang disertai dengan jaminan (atau agunan). Sesuatu yang dijadikan sebagai jaminan disebut marhun, pihak yang menyerahkan jaminan disebut rahin, sedangkan pihak yang menerima jaminan disebut murtahin. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peranan PT. Pegadaian (Persero) Cab. Takalar dalam upaya meningkatkan ekonomi ummat di Kab. Takalar dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong dan menghambat PT. Pegadaian Cab. Takalar dalam meningkatkan perekonomian ummat di Kab. Takalar..

Dalam pengumpulan data, digunakan metode *library research* yaitu membaca literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang akan dikaji. Di samping itu, menggunakan metode *field research* yaitu memperoleh data dari PT. Pegadaian Cab. Takalar dimana penyelesaiannya melalui bentuk observasi, wawancara dan dokumentasi dengan menggunakan metode pendekatan Syar’i serta jenis penelitian kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa PT. Pegadaian (Persero) Cab. Takalar, sangat berperan penting dalam meningkatkan perekonomian, di lihat sampai saat ini pegadaian masih merupakan suatu perusahaan yang masih diminati oleh banyak masyarakat meskipun masyarakat menyadari bahwa bunga yang diberikan oleh pegadaian masih sangat relatif lebih tinggi di bandingkan dengan perusahaan pengkreditan lainnya. Namun faktor utama yang menjadi pendorong masyarakat melakukan transaksi gadai adalah prosesnya yang mudah, cepat dan aman yang mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat menengah ke bawah walau dengan pinjaman yang sangat kecil.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pertumbuhan ekonomi nasional yang baik merupakan salah satu indikator sehatnya kondisi perekonomian suatu negara. Salah satu cara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional adalah dengan meningkatkan pertumbuhan sektor riil ataupun meningkatkan pendapatan nasional. Kredit merupakan salah satu cara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kredit yang digunakan masyarakat untuk modal usaha dapat meningkatkan pertumbuhan sektor riil, sedangkan kredit yang digunakan masyarakat untuk konsumsi dapat meningkatkan konsumsi masyarakat, yang kemudian akan meningkatkan *agregat demand* (pendapatan nasional). Kredit merupakan salah satu cara untuk membantu masyarakat dalam mendapatkan pinjaman dana. Berkaitan dengan kebutuhan dana bagi masyarakat untuk berbagai kepentingan ekonomi, muncullah permintaan kredit.

Permintaan kredit dari masyarakat dapat dipengaruhi oleh tingkat suku bunga, PDB Riil, resiko dan ketidakpastian. Perum Pegadaian sebagai lembaga keuangan bukan bank memiliki fungsi menyalurkan dana ke masyarakat dalam bentuk kredit. Kredit Cepat dan Aman (KCA) adalah salah satu kegiatan utama Perum Pegadaian. KCA yang diberikan oleh Perum Pegadaian menunjukkan tren yang positif dari tahun ke tahun, termasuk saat terjadi krisis moneter. Pada tahun 1997 total kredit yang disalurkan oleh Perum Pegadaian adalah sebesar Rp. 2,077 triliun dan pada tahun 2006 kredit yang disalurkan meningkat cukup tinggi sebesar Rp. 17,294 triliun (Laporan Tahunan Perum Pegadaian, 2006).

Kemajuan daerah dinilai dari beberapa aspek. Salah satunya berdasarkan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Takalar yang menjadi kawasan Pamminasata termasuk mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang mencapai kisaran 7,34 persen, pada tahun lalu.

Ini artinya, sepanjang tahun 2011, pertumbuhan ekonomi Takalar melaju pesat dibandingkan dengan daerah lainnya. Bupati Takalar, Ibrahim Rewa menargetkan, tahun ini, Takalar dapat mencapai pertumbuhan ekonomi hingga delapan persen.

"Kondisi ini mencerminkan Takalar sudah lebih maju. Perkembangan ekonomi Takalar cukup menjanjikan untuk lebih dikembangkan," kata Ibrahim, di sela-sela acaranya.

Sekretaris Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Muallim menilai, keberhasilan Takalar mencapai peningkatan ekonomi di atas tujuh persen, adalah prestasi pembangunan yang luar biasa. Muallim bahkan menyatakan pertumbuhan ekonomi Takalar telah jauh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya berada di kisaran 6,3 persen.<sup>1</sup>

"Capaian ini adalah sebuah ukuran keberhasilan pemerintah daerah Takalar meningkatkan kesejahteraan masyarakat," puji Muallim.

---

<sup>1</sup> <http://www.fajar.co.id/read-20121009192113-pertumbuhan-ekonomi-takalar-lampaui-capaian-nasional>

Dia menambahkan, Takalar cukup berpotensi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dari yang diperoleh. Tentunya, pertumbuhan ekonomi tersebut dibarengi pendapatan per kapita dan daya beli masyarakat semakin meningkat, serta mobilitas laju pertumbuhan sektor lainnya yang ikut meningkat.

Selain itu perkembangan dunia usaha yang semakin pesat dan kegiatan perekonomian yang secara otomatis terdapat didalamnya akan membuat semakin diperlukannya sumber-sumber dana untuk membiayai kegiatan ekonomi atau kegiatan usaha. Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan dunia usaha memiliki kaitan yang cukup erat dengan perkreditan.

Perkembangan perekonomian dalam suatu wilayah tertentu dapat dilihat dari beberapa indikator-indikator perekonomian. Perkembangan yang terjadi pada indikator ekonomi makro dapat mencerminkan pertumbuhan ekonomi. Indikator tersebut dapat dilihat dari peningkatan yang terjadi pada pendapatan perkapita suatu daerah yang mencerminkan kesejahteraan setiap individu.

Pendapatan perkapita merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran penduduk disatu daerah. Pendapatan perkapita berpengaruh secara signifikan terhadap kredit pegadaian.

Pegadaian menurut undang-undang hukum perdata pasal 1150 di sebutkan : “Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh orang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara

didahulukan dari pada orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana yang harus didahulukan.<sup>2</sup>

Pada masa pemerintah RI, dinas pegadaian yang merupakan kelanjutan dari pemerintahan Hindia-Belanda, status pegadaian diubah menjadi perusahaan Negara (PN) Pegadaian berdasarkan Undang-undang No. 19 PRp 1960 jo. Peraturan Pemerintah RI No. 178 Tahun 1960 tanggal 3 Mei 1961 tentang Pendirian Perusahaan Pegadaian (PN Pegadaian). Kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 1969 11 Maret 1969 tentang Perubahan Kedudukan PN Pegadaian menjadi Jawatan Pegadaian jo. UU No. 9 tahun 1969 tanggal 1 Agustus 1969 dan penjelasannya mengenai bentuk-bentuk usaha negara dalam perusahaan jawatan (perjan), perusahaan umum (perum) dan perusahaan perseroan (Persero). Selanjutnya untuk meningkatkan efektifitas dan produktivitasnya, bentuk Perjan pegadaian tersebut kemudian dialihkan menjadi perusahaan umum (perum) pegadaian berdasarkan peraturan pemerintah No. 10 Tahun 1990 tanggal 10 april 1990. Dengan perubahan status dari Perjan menjadi Perum, Pegadaian diharapkan agar lebih mampu mengelolah usahanya dengan lebih profesional, tanpa meninggalkan ciri khusus misinya, yaitu penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai dengan pasar sasaran adalah masyarakat golongan ekonomi lemah dan dengan cara mudah, cemat aman dan hemat, sesuai dengan motonya menyelesaikan masalah tanpa masalah.

---

<sup>2</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Cet 2; Jakarta: Kencana 2010). h. 387-388

Indonesia yang berdasarkan hukum diperbolehkan melakukan pembiayaan dengan bentuk penyaluran kredit atas dasar hukum gadai. Tugas pokok perum pegadaian adalah menjembatani kebutuhan dana masyarakat dengan pemberian uang pinjaman berdasarkan hukum gadai. Tugas tersebut dimaksud untuk membantu masyarakat agar tidak terjatuh dalam praktik-praktik lintah darat. Kantor pusat Perum Pegadaian berkedudukan di Jakarta, dan dibantu oleh kantor daerah, kantor perwakilan daerah dan kantor cabang. Jaringan usaha Perum Pegadaian telah meliputi lebih dari 500 cabang yang tersebar di wilayah Indonesia.<sup>3</sup>

Pegadaian syariah dalam menjalankan operasionalnya berpegang kepada prinsip syariah. Pada dasarnya, produk-produk berbasis syariah memiliki karakteristik seperti tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena riba, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan, dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa dan/atau bagi hasil. Payung hukum gadai syariah dalam hal pemenuhan prinsip-prinsip syariah berpegang pada Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI III/2002 tanggal 26 juni 2002 tentang rahn yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn diperbolehkan, dan Fatwa DSN MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang gadai emas. Sedangkan dalam aspek kelembagaan tetap menginduk kepada Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1990 tanggal 10 April 1990.

---

<sup>3</sup>*Ibid* . h. 388-389

Perum pegadaian menyadari betapa pentingnya pembangunan daerah, karena itu perusahaan ini turut membantu dengan jalan menawarkan jasanya berupa kredit gadai kepada seluruh masyarakat yang dapat menjangkau tempat dimana perusahaan ini berada. Sasaran utama dari perum pegadaian adalah masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Di masa yang sulit ini tentunya masyarakat golongan ini sangat membutuhkan dana untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dan kehidupan usahanya. Menyadari akan hal ini, maka perum pegadaian menawarkan salah satu jasanya yaitu jasa kredit gadai. Yang di maksud dengan kredit gadai yaitu pemberian sejumlah uang pinjaman dengan jangka waktu tertentu berdasarkan hukum gadai (syarat-syarat yang di tetapkan dengan agunan barang bergerak).<sup>4</sup>

Perum pegdaian dapat menyediakan dana dalam waktu yang singkat dan kemudian memberikan sejumlah uang pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan dana dalam waktu yang singkat. Uang pinjaman dapat di berikan kepada masyarakat apabila mereka mempunyai suatu barang jaminan yang memiliki nilai ekonomis. Selain selalu mengeluarkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan, perusahaan ini juga membutuhkan dana agar dapat selalu tersedia dana untuk di pinjamkan. Dalam memberikan pinjaman sejumlah uang kepada masyarakat, perusahaan ini menggunakan bunga sesuai aturan yang berlaku. Namun bunga yang di kenakan tidak memberatkan masyarakat, karena misi perusahaan ini adalah ikut meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan

---

<sup>4</sup>Martono, *Bank dan Lembaga Lainnya*, (Yogyakarta : Ekonisia, 2002), h. 47.



masyarakat golongan menengah ke bawah melalui penyediaan dana berdasarkan hukum gadai dan melakukan usaha lain yang menunjang.

Arti penting pegadaian bagi masyarakat golongan ekonomi lemah, yaitu membantu mereka yang membutuhkan modal dengan cepat sehingga tidak perlu menjatuhkan alternatif pilihan yang jauh lebih berat seperti mencari pinjaman kepada rentenir.<sup>5</sup>

Adapun dalam pegadaian syariah Dua bank umum yang ada di Indonesia, bank muamalat dan bank syariah Mandiri rupanya menunjukkan minat serius untuk menggarap gadai syariah. Bukan tanpa alasan mereka tertarik untuk menggarap gadai ini. Di samping alasan rasional, bahwa gadai ini memiliki potensi pasar yang besar, sistem pembiayaan ini memang memiliki landasan syariah. Apalagi terbukti di negara-negara mayoritas penduduk muslim, seperti di timur tengah dan malaysia, pegadaian syariah telah berkembang pesat.<sup>6</sup>

Dalam praktiknya bank muamalat menggandeng perum pegadaian untuk suatu aliansi strategi. Perum pegadaian tentu saja berkontribusi dalam bidangnya, yaitu gadai, sedangkan bank Muamalat memberi muatan syariah. Kedua lembaga keuangan itu mengadakan kerja sama dalam bentuk musyarakah. Kerja sama musyarakah merupakan perkongsian dana yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam suatu usaha yang di jalankan oleh pelaksana usaha. Dalam hal ini BMI memberikan dana dan pelantikan mengenai prinsip syariah, sedangkan pegadaian menyediakan infrastruktur semacam gedung, peralatan, juga

---

<sup>5</sup> *Ibid*, h. 48

<sup>6</sup>Mustafa Edwin Nasution dkk. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Cet 3; Jakarta: Kencana 2010). h. 313-315.

keterampilan teknis pegadaian dan sumber daya manusia. *Sedangkan BSM menjalankannya sendiri.*

Landasan syariahnya adalah kisah dimasa rasulullah, ketika seseorang menggadaikan kambingnya. Saat itu rasul ditanya bolehkah kambingnya diperah. Nabi mengisinkan, sekedar untuk menutup biaya pemeliharaan. Artinya, Nabi mengizinkan kita boleh mengambil keuntungan dari barang yang digadaikan sekedar menutup biaya pemeliharaan.<sup>7</sup>

Muhammad Syafi'i Antonio dalam bukunya, *Bank syariah : dari teori ke praktik*, bahwa pengertian gadai atau *ar-Rahn*, mengutip pandangan Sayyid Sabiq, adalah menyimpan sementara harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang di berikan oleh si piutang. Berarti, barang yang dititipkan pada si piutang dapat di ambil kembali dalam jangka waktu tertentu. Dalam QS. Al-Baqarah ayat 283 disebutkan :

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَتَجِدُوا كَاتِبًا فَرَلِمَ هُنَّ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَمِنْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ  
الَّذِي أَوْْتُمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ  
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Terjemahnya :

jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalat tidak secara tunai ) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang) akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah tuhan nya ; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang

---

<sup>7</sup> *Ibid.* h. 316

menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.<sup>8</sup>

Secara eksplisit menyebutkan barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Dalam dunia finansial, barang tanggungan biasa dikenal sebagai jaminan (kolateral) atau objek gadai.

Selain itu, istilah *Ar-Rahn* juga disebut dalam salah satu hadist yang artinya:

“ apabila ada ternak digadaikan, punggungnya boleh dinaiki (oleh orang yang menerima gadai) karena ia telah mengeluarkan biaya (menjaga )nya... kepada orang yang naik ia harus mengeluarkan biaya perawatannya”

Sedangkan perbedaan gadai syariah dengan konvensional adalah dalam hal pengenaan bunga. Pegadaian syariah menerapkan beberapa sistem pembiayaan, antara lain *qardhul hasan* (pinjaman kebijakan), *mudharabah* (bagi hasil) *muqayadah* (jual beli).<sup>9</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana peranan PT. Pegadaian (Persero) Cab. Takalar dalam upaya meningkatkan ekonomi umat di Kab. Takalar ?
2. Faktor-faktor apa yang mendorong dan menghambat PT. Pegadaian (Persero) Cab. Takalar dalam meningkatkan perekonomian umat di Kab. Takalar?

## **C. Pengertian judul**

Judul skripsi ini adalah “Peranan PT. Pegadaian (Persero) Cab. Takalar dalam Meningkatkan Ekonomi Ummat di Kab. Takalar” untuk menghindari

---

<sup>8</sup>Departmen Agama Repoblik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV.Toha Putra Semarang 1989), h. 297-298

<sup>9</sup>*Op-cit*, Mustafa Edwin Nasution dkk. h. 316

kekeliruan pandangan terhadap pengertian yang sebenarnya dari judul skripsi ini maka penulis menjelaskan beberapa kata dalam judul skripsi ini, diantaranya sebagai berikut :

1. Peranan adalah suatu kondisi atau kedudukan yang memberi pengaruh terhadap keadaan yang ada disekitar kita.
2. PT. Perseroan Terbatas adalah suatu persekutuan yang menjalankan usahanya dengan modal saham Setiap persero bisa membeli / memiliki lebih dari satu saham.
3. Pegadaian adalah sebuah BUMN di Indonesia yang usaha Intinya adalah bidang jasa penyaluran kredit kepada masyarakat atas dasar hukum gadai.
4. Meningkatkan adalah menaikkan (derajat, taraf, dsb); mempertinggi; memperhebat (produksi dsb).
5. Ekonomi adalah asal kata ekonomi adalah dari bahasa yunani yaitu “oikos” dan “nomos”. Kata tersebut secara terpisah berarti rumah tangga (oikos) dan ilmu (nomos). Secara umum, bisa dibilang bahwa ekonomi adalah sebuah bidang kajian tentang pengurusan sumber daya material individu, masyarakat, dan negara untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Karena ekonomi merupakan ilmu tentang perilaku dan tindakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang bervariasi dan berkembang dengan sumber daya yang ada melalui pilihan-pilihan kegiatan produksi, konsumsi dan atau distribusi.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> <http://nizarakbar.blogspot.com/2012/05/pengertian-dan-definisi-ekonomi-menurut.html>

6. Ummat adalah aKata ummat terambil dari kata (amma-yaummu) Yang berarti menuju, menumpu, dan meneladani. Dari akar yang sama, lahir antara lain kata um yang berarti "ibu" dan imam yang maknanya "pemimpin"; karena keduanya menjadi teladan, tumpuan pandangan, dan harapan anggota masyarakat<sup>11</sup>.

Secara operasional maksud dari judul “ Peran PT. Pegadaia (Persero) Cab. Takalar dalam meningkatkan perekonomian ummat di kab. Takalar. Adalah untuk mengetahui sejauh mana PT. Pegadaian (Persero) Cab. Takalar mampu memberikan peningkatan perekonomian di Kab. Takalar dan apa yang membuat nasabah tetap melakukan transaksi gadai dengan bunga yang relatif tinggi jika dibandingkan dengan perusahaan pemberi kredit lainnya.

#### **D. Kajian pustaka**

Kajian pustaka yang dimaksud dalam skripsi ini bertujuan untuk memberikan penjelasan masalah pokok yang dibahas dengan teori yang ada di dalam buku, dan hanya mengacu pada “Peranan PT. Pegadaian (Persero) Cab. Takalar dalam Meningkatkan Ekonomi Ummat di Kab. Takalar. Adapun buku-buku yang dapat dijadikan acuan untuk pembahasan selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Mustafa Edwin Nasution dalam bukunya ” pengenalan eksklusif ekonomi islam: segala kegiatan ekonomi yang kemudian bermuara pada pembentukan defenisi ekonomi islam

---

<sup>11</sup>[http://www. Dr. M. Quraish Shihab, M.A. /Umat.html](http://www.Dr.M.QuraishShihab,M.A./Umat.html)

2. Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A. dalam bukunya “hukum gadai syariah” :  
buku ini menguraikan pengertian gadai dan dasar hukumnya serta sejarah pegadaian syariah. Selanjutnya, mendiskusikan rukun dan syarat gadai, hak dan kewajiban para pihak yang berakad serta akad gadai, pemanfaatan barang gadai menurut *fuqaha*, mekanisme pemberian pinjaman, sistem cicilan dan perpanjangan serta pelelangan barang gadai.
3. Heri Sudarsono dalam bukunya “Bank dan Lembaga Keuangan Syariah” :  
buku ini ringkas dalam membahas dan menjelaskan peran fungsi lembaga-lembaga keuangan islam, baik yang berupa bank maupun non bank.
4. M.Rusydi Rahman dalam bukunya “Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya” :  
secara umum lembaga keuangan dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Lembaga keuangan bank misalnya bank umum, bank perkreditan dan bank bagi hasil, sedangkan lembaga keuangan non bank misalnya lembaga pembiayaan, usaha perasuransian, dana pensiun dan perum pegadaian.

#### **E. Garis-Garis Besar Isi Skripsi**

Skripsi ini terdiri dari lima bab, untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi skripsi ini, maka akan diberikan gambaran secara umum berupa garis-garis isi skripsi.

Bab I, merupakan pendahuluan. Dari bab ini di kemukakan latar belakang masalah, rumusan masalah, hipotesis, pengertian judul, kajian pustaka, tujuan dan kegunaan, penelitian serta garis-garis besar isi skripsi.

Bab II, sebagai tinjauan umum dari tema skripsi. Oleh karena itu, bab ini khusus membahas secara umum tentang pegadaian.

Bab III, penulis membahas tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini. Penelitian ini menggunakan teknik penentuan lokasi, teknik pendekatan, teknik pengendalian, dan dalam pengumpulan data digunakan library reseach (kepustakaan), yaitu pengumpulan dan membawa buku-buku yang ada hubungannya dengan masalah-masalah yang akan dibahas dan ditinjau lapangan di Perum Pegadaian Kab. Takalar.

Bab IV, bab ini membahas tentang hasil dan pembahasan penelitian mengenai Peranan PT. Pegadaian (Persero) Cab. Takalar dalam Meningkatkan Ekonomi Ummat di Kab. Takalar.

Bab V, bab penutup yang membahas tentang kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah dilakukan.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pengertian Gadai, Manfaat dan Tujuan Gadai**

##### **a. Pengertian Gadai**

Menurut bahasa, gadai (al-rahn) berarti al-tsubutdan al-habs yaitu penetapan dan penahanan. Ada pula yang menjelaskan bahwa rahn adalah terkurung atau terjerat.

Menurut istilah syara' yang dimaksud dengan rahn adalah:

1. Akad yang objeknya menahan harga terhadap suatu hak yang mungkin diperoleh bayaran dengan sempurnanya.
2. Menjadikan suatu benda berharga dalam pandangan syara' sebagai jaminan atas utang selama ada dua kemungkinan, untuk mengembalikan uang itu atau mengambil sebagian benda itu.
3. Gadai adalah akad perjanjian pinjam meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan utang.
4. Menjadikan harta sebagai jaminan utang.
5. Menjadikan zakat suatu benda sebagai jaminan utang.
6. Gadai ialah menjadikan harta benda sebagai jaminan atas utang.
7. Gadai adalah suatu barang yang dijadikan peneguhan atau penguat kepercayaan dalam utang piutang.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Cet 5; Jakarta: Rajawali Pers, 2010). h.105-106



8. Gadai ialah menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan utang, dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima.

Istilah yang digunakan fikih untuk gadai (al-rahn) adalah sebuah akad utang piutang yang disertai dengan jaminan (atau agunan). Sesuatu yang dijadikan sebagai jaminan disebut marhun, pihak yang menyerahkan jaminan disebut rahin, sedangkan pihak yang menerima jaminan disebut murtahin.<sup>2</sup>

Gadai (ar-rahn) adalah membahas salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang di tahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa rahn adalah semacam jaminan utang atau gadai.<sup>3</sup>

Perusahaan umum (perum) pegadaian adalah badan usaha tunggal yang diberikan wewenang untuk menyalurkan kredit atau pinjaman uang atas dasar hukum gadai berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan oleh menteri keuangan RI, dimana masyarakat membutuhkan dana pinjaman diwajibkan menyerahkan harta bergerak kepada kantor cabang pegadaian disertai pemberian hak untuk melakukan penjualan lelang bila setelah waktu perjanjian kredit habis, nasabah yang tidak menebus barang tersebut . hasil lelang digunakan untuk melunasi

---

<sup>2</sup> Ghufroon A. Mas'adi, M.Ag., *Fiqih Muamalah Kontekstual*, (Cet 1; Jakarta PT. Raja Grafindo Persada 2002) h. 175-176.

<sup>3</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*. (cet 1; Jakarta: Gema Insani 2001). h.128

pokok pinjaman disertai bunga ditambah dengan biaya lelang, sisa dikembalikan kepada nasabah pemilik barang semula.

Menurut kitab undang-undang Hukum perdata pasal 1150 disebutkan gadai adalah suatu hak yang di peroleh seseorang yang berpiutang atas suatu barang yang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seseorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut serta didahulukan pada orang-orang yang berpitang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana yang harus didahulukan.<sup>4</sup>

Dalam Ensiklopedia Indonesia, disebutkan bahwa gadai atau hak gadai adalah hak atas benda terhadap benda bergerak milik si berhutang yang diserahkan ketangan si pemiutang sebagai barang jaminan pelunasan hutang si berhutang tersebut tadi. Jaminan dengan benda takbergerak disebut hipotek ( hak benda terhadap sesuatu benda tak bergerak yang memberi hak preferensi kepada seseorang yang berpitang/pemegang hepotek untuk memungut piutangnya dari hasil penjualan tersebut).<sup>5</sup>

#### b. Manfaat Gadai (rahn)

1. Bagi nasabahtersedianya dana dengan prosedur yang relatif lebih sederhana dan dalam waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan pembiayaan/kredit

---

<sup>4</sup> Rudy Rahman, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Makassar: 2009), h. 38.

<sup>5</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Cet 1 ; jakarta : Raja Wali Pers, 2003). h. 253

atau perbankan. Di samping itu, nasabah juga mendapat manfaat penekstiran nilai suatu barang bergerak secara profesional. Mendapatkan fasilitas penitipan barang bergerak yang aman dan dapat dipercaya.

2. Bagi perusahaan pegadaian;

- a. Penghasilan yang bersumber dari sewa modal yang dibayarkan oleh peminjam dana.
- b. Penghasilan yang bersumber dari ongkos dibayarkan oleh nasabah memperoleh jasa tertentu. Bagi bank syariah yang mengeluarkan produk gadai syariah dapat mendapat keuntungan dari pembebanan biaya administrasi dan biaya sewa tempat penyimpanan emas.
- c. Pelaksanaan misi perum pegadaian sebagai BUMN yang bergerak di bidang pembiayaan berupa pemberian bantuan kepada masyarakat yang memerlukan dana dengan prosedur yang relatif sederhana.
- d. Berdasarkan PP No. 10 Tahun 1990, laba yang diperoleh digunakan untuk:<sup>6</sup>
  1. Dana pembangunan semesta (55%).
  2. Cadangan umum (20%).
  3. Cadangan tujuan (5%).
  4. Dana sosial (20%).

Sedangkan manfaat yang dapat diambil oleh bank dari prinsip ar-rahn adalah

1. Menjaga kemungkinan nasabah untuk lalai atau bermain-main dengan fasilitas pembiayaan yang diberikan bank.

---

<sup>6</sup>,Andri Soemitra, *Op Cit*, h. 394-395

2. Memberikan keamanan bagi semua penabung dan pemegang deposito bahwa dananya tidak akan hilang begitu saja jika nasabah peminjam ingkar janji karena ada suatu aset atau barang (marhun) yang dipegang oleh bank.
3. Jika rahn diterapkan dalam mekanisme pegadaian, sudah barang tentu akan sangat membantu saudara kita yang kesulitan dana, terutama di daerah-daerah.

Adapun manfaat yang langsung didapatkan bank adalah biaya-boaya konkret yang harus dibayar nasabah untuk pemeliharaan dan keamanan aset tersebut. Jika penahanan aset berdasarkan fidusia (penahanan barang bergerak, sebagai jaminan pembayaran), nasabah juga harus membayar biaya asuransi yang besarnya sesuai dengan yang berlaku secara umum.<sup>7</sup>

c. Tujuan Gadai (rahn)

1. Turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pembiayaan/ pinjaman atas dasar hukum gadai.
2. Pencegahan praktik ijon, pegadaian gelap, dan pinjaman tidak wajar lainnya.
3. Pemanfaatan gadai bebas bunga pada gadai syariah memiliki efek jaringan pengaman sosial masyarakat yang butuh dana mendesak tidak lagi dijerat pinjaman/pembiayaan berbasis bunga.
4. Membantu orang-orang yang membutuhkan pinjaman dengan syarat muda.<sup>8</sup>

Menurut Iman Hanafi, penggadaian termasuk beban (atas barang penggadaian) untuk suatu batas pinjaman. Sebagai contoh sehelai barang berharga sepuluh dirham digadaikan seharga sepuluh dirham, pemegang gadai tidak dapat

---

<sup>7</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Op Cit*, h. 130.

<sup>8</sup> Andri Soemitra, *Op Cit*, h. 394

dituntut oleh penggadaai sekiranya barang gadai hilang ditangan pemegang gadai. Tetapi mereka harus berunding dengan penggadaai mengenai bayaran sisa dari sebagian dari utang itu, misalnya, lima dirham, sekiranya kain tersebut bernilai lima dirham dan akan dibayar kepada penggadaai atau memegangnya sebagai amanah apabila kain tersebut bernilai lebih dari jumlah pinjaman.

Berdasarkan pendapat iman syafi'i tanggungan adalah suatu amanah yang di pegang oleh pemegang gadai dan begitulah semua sisa utang penggadaai harus dibayar jika tanggungan hilang semasa di tangan pemegang gadai. Dia berpegang pada hadist Nabi saw., bahwa harta gadaian tidak boleh dihilangkan dan inilah yang disebut ghumh karena fungsi kegunaan bagi pegadaian bagi penggadaai dan merupakan kerugian bagi pemegang gadai yang disebut ghumh. Selanjutnya Imam Syafi'i menegaskan bahwa kepunyaannya adalah tanggungan yang diberikan kepada pemegang gadai sedangkan hak milik tetap pada penggadaai yang kelak akan ditebus oleh penggadaai. Sebagai pemilik, penggadaai berhak menggunakan barang gadaian dan bertanggung jawab atas kerugiannya. Pemegang gadai sebagai pemegang amanah tidak dapat mengambil tanggung jawab atas kehilangan tanggungan, sehingga apa yang dapat diperoleh kembali dari penggadaai adalah apa yang di pinjamkan kepadanya.<sup>9</sup>

## **B. Ekonomi Ummat**

Kondisi ekonomi umat di Indonesia, secara umum, masih belum mandiri, bahkan masih jauh dari kemandirian. Parameter ketidak mandirian ekonomi umat itu terlihat pada banyak fakta dan kondisi objektif perekonomian umat, yaitu :

---

<sup>9</sup> DR. Muhammad Muslehuddin, Ph.D, Sistem Perbankan Dalam Islam,(Cet 3; Jakarta : Rineka Cipta, 2004). h. 88-89.

*Pertama*, angka kemiskinan masih menggurita di Indonesia. Kalau digunakan indicator kemiskinan menurut ILO dimana perkapita di bawah 2 dolar sehari, maka angka kemiskinan di Indonesia mencapai 100 juta jiwa lebih. Bagaimana bisa dikatakan mandiri, kalau kemiskinan masih menggeluti umat.

*Kedua*, sumber daya alam Indonesia yang strategis umumnya dikuasai oleh asing. Minyak Bumi dikuasai oleh asing sebesar 87 persen, Dengan demikian Indonesia hanya menguasai 13 persen SDA minyak bumi, Fakta ini membuat bangsa kita (yang sebagian besar umat), tergantung kepada asing. Demikian pula hasil SDA lainnya, seperti emas dan gas.

*Ketiga*, kebutuhan pangan bagi rakyat yang semakin tergantung dari import dengan tingkat ketergantungan yang semakin tinggi. Fakta ini jelas menunjukkan ketidakmandirian pangan umat.

*Keempat*, lembaga produsen yang memproduksi kebutuhan umat, hampir semuanya dikuasai minhum (non umat), seperti kebutuhan sehari-hari sabun, shampoo, susu, odol dan hampir semua kebutuhan sehari-hari. Peran umat sangat kecil, bahkan umat, bukan saja marginal dalam produksi, tetapi juga marginal dalam penguasaan jalur distribusi. Karena produsen bukan berasal dari gerakan ekonomi umat, maka posisi umat hanya sebagai konsumen belaka. Kebutuhan konsumsi umat tergantung kepada gerakan ekonomi lain. Seharusnya bank-bank syariah dapat membiayai produsen-produsen muslim.

*Kelima*, jumlah pengusaha kecil dan mikro masih mendominasi di Indonesia, jumlahnya mencapai 40 jutaan. Usaha-usaha mikro dan kecil atau apa yang dikenal dengan “sector informal” atau lebih jelas lagi self-employed workers

memiliki pendapatan yang sangat rendah. misalnya, penjual bakso, nasi goreng keliling, penjual sayur, pedagang asongan, warteg sederhana, pedagang kaki lima (PKL), tukang parkir, dan lain-lain yang umumnya produktifitasnya rendah, sehingga pendapatannya pun rendah sekali.

*Keenam*, asset bank-bank syariah dan lembaga keuangan syariah masih kecil, selebihnya adalah didominasi lembaga keuangan konvensional. Market share bank syariah baru sekitar 3 persen. Asset yang kecil ini, tentu berdampak terhadap kecilnya peran bank syariah dan sekaligus berimplikasi pada kecilnya upaya memandirikan umat. Selain itu, Lembaga perbankan konvensional ini mayoritas dimiliki asing, yaitu sekitar 67 persen, Secara makro fakta ini berpengaruh pada perwujudan kemandirian ekonomiumat, Jika ekonomi lebih dominan dikuasai asing, maka upaya memandirikan ekonomi umat akan terkendala.<sup>10</sup>

#### a. Memandirikan Ummat

Upaya mewujudkan kemandirian ekonomi umat, merupakan sebuah pekerjaan besar dan panjang. *Pertama*, membangun etos entrepreneurship umat dan membekali mereka dengan skills yang unggul dan berdaya saing. *Kedua*, melaksanakan training-training dan workshop keterampilan. Hal ini penting, karena kualitas SDM umat masih rendah. Selain itu perlu meningkatkan kualitas pendidikan dan strata pendidikan umat melalui pendidikan formal, *Ketiga*, Jika Usaha kecil itu merupakan produsen, maka mereka harus dibantu dalam

---

<sup>10</sup><http://www.pkesinteraktif.com/edukasi/opini/3159-mewujudkan-kemandirian-ekonomi-umat.html>

pemasaran produk-produknya. *Keempat* meningkatkan kualitas produk yang memenuhi standar sehingga. *Kelima*, memberikan dukungan permodalan melalui program pemerintah, lembaga perbankan dan lembaga keuangan lainnya. *Keenam*, mendorong dan memotivasi umat untuk produktif di sector pertanian, pertambangan, perkebunan, dsb, agar mereka mandiri secara ekonomi. *Ketujuh*, membantu usaha kecil dan mikro dalam mengakses lembaga perbankan, baik dalam pembuatan proposal, membuat laporan keuangan dan penerapan manajemen keuangan yang modern.

*Kedelapan*, optimalisasi peran pemerintah dalam kebijakan dan regulasi. Kebijakan pemerintah harus benar2 prorakyat (proumat). Kita harus mendesain system ekonomi yang lebih mengikuti kaidah-kaidah prorakyat yang menitikberatkan pada pemerataan dan kesejahteraan guna menghasilkan keadilan. Inilah elan vital ekonomi syariah. Kebijakan ekonomi baik di pusat maupun di daerah haruslah diarahkan untuk pemberdayaan umat menuju kemandirian.

Ekonomi syariah meniscayakan terwujudnya good governance yang prinsip-prinsipnya adalah aksesibilitas, transparansi dan akuntabilitas dalam semua aspek, termasuk (renegoisasi) kontrak karya. Kita harus kembali pada ajaran kemandirian yang diajarkan Umar bi Khattab,. “ Kuasai ekonomi dan produktif-lah, kalau tidak , saya khawatir kamu akan tergantung kepada mereka”. Semua ini dimaksudkan untuk mencapai peri kehidupan umat yang mandiri, yang bebas, merdeka (liberty), adil (equality, justice), dan sejahtera (prosperity).

b. Peranan lembaga keuangan Islam.



Lembaga perbankan dan keuangan syariah sangat berperan mendukung terbangunnya kemandirian ekonomi umat. Lembaga-lembaga perbankan dan keuangan syariah ini, sudah seharusnya berupaya keras untuk memandirikan ekonomi umat. Untuk itu masyarakat, aghniyah, ulama dan pemerintah daerah seharusnya mendirikan dan mengembangkan lembaga-lembaga keuangan mikro syariah, seperti BPR Syariah dan BMT, koperasi syariah dan pegadaian syariah. Program pendampingan kepada usaha kecil dan mikro perlu dilakukan, demikian pula penciptaan kelompok usaha bersama melalui BMT, harus diteruskan dan diperluas oleh pemerintah(Depsos).

Bank-bank syariah baik bank umum maupun unit usaha syariah seharusnya juga didukung segenap kaum muslimin Indonesia, agar besaran market sharenya meningkat yang pada gilirannya akan berdampak pada kemandirian ekonomi umat. Kita harapkan kepada bank-bank syariah untuk tetap dan terus pro kepada umat agar ekonomi umat mandiri dan sejahtera. Selama ini, pembiayaan bank-bank syariah 70 persen sudah diperuntukkan bagi usaha kecil.

### **C. PP Tentang Pegadaian**

Terjadinya krisis ekonomi di Indonesia yang dimulai pada tahun 1997, membuat sejumlah perusahaan berskala besar jatuh terpuruk, dan tidak sedikit juga hal itu dialami oleh perusahaan-perusahaan berskala kecil. Namun demikian bagi perusahaan kecil-menengah (UMKM) baik formal maupun informal ternyata mereka lebih sanggup bertahan dan justru segera dapat kembali pulih dan berkembang menata usahanya lebih cepat dibanding perusahaan-perusahaan

besar. Seperti yang telah dibuktikan dengan data statistik populasi sektor UMKM mencapai 90,9% dari 42 juta unit usaha di Indonesia yang ternyata mampu menjadi penopang perekonomian nasional.

Laju perkembangan yang terus meningkat secara langsung akan memperkuat struktur perekonomian nasional dan hal itu terjadi karena adanya dukungan pendanaannya oleh lembaga keuangan baik perbankan maupun non bank. Lembaga keuangan baik yang berstatus Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun swasta mempunyai peran strategis, sebagai agent of development untuk membangun perekonomian yang pada akhirnya turut serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa sejalan dengan program pemerintah yang menetapkan bahwa mulai tahun 2005 ditetapkan sebagai Keuangan Mikro, dimana sebagian energi dan keberpihakan lembaga keuangan diarahkan untuk memberdayakan sektor usaha mikro, maka dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil, masing-masing lembaga keuangan berkompetisi dalam penyaluran dananya untuk membantu sektor UMKM. Banyak diantara BUMN yang sukses menyalurkan kreditnya, tetapi tidak sedikit yang justru tidak mampu melaksanakan program tersebut, walaupun alokasi dana yang tersedia cukup melimpah.<sup>11</sup>

Apa yang dilakukan perbankan juga dilakukan oleh pegadaian sebagai lembaga keuangan non bank yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mana pasca krisis turut berpartisipasi membantu program

---

<sup>11</sup> <http://www.uu-anti-monopoli-dan-peran-pegadaian.html>

pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat kecil/menengah melalui jasa layanan kreditnya dengan jaminan gadai & fidusia.

Pegadaian sebagai BUMN berbentuk Perusahaan Umum (PERUM) mempunyai kedudukan strategis dalam membangun perekonomian masyarakat kecil/menengah, yaitu membantu Pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat kecil/menengah melalui jasa penyaluran kredit atas dasar hukum gadai dan usaha lain yang menguntungkan( pasal 7 P.P.103/2000) hal ini sebagai pelaksanaan dari ketentuan pasal 36 U.U.No.19/2003 tentang BUMN bahwa maksud dan tujuan PERUM adalah "Menyelenggarakan usaha yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan jasa barangan/atau jasa yang berkuallitas dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat".

**a. Undang-Undang Anti Monopoli dan RUU Jasa Gadai**

Dibukanya era perdagangan bebas dengan terbitnya U.U.No.5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, maka setiap orang mempunyai kebebasan melakukan kegiatan dalam berbagai jenis usaha termasuk usaha jasa gadai kecuali yang bertentangan dengan hukum yang berlaku. Dalam U.U.No.5 tahun 1999 secara tegas melarang praktek monopoli termasuk yang dilakukan oleh BUMN. Undang-undang tersebut membawa iklim kondusif bagi Para pelaku usaha untuk menjaga agar dapat tercipta persaingan usaha yang sehat.

Persaingan perlu dijaga eksistensinya agar tercipta efisiensi baik oleh Pengusaha maupun masyarakat sebagai konsumen. Dengan persaingan akan

diperoleh harga yang murah dengan kualitas barang/jasa yang baik. Larangan praktek monopoli diantaranya dalam bentuk Larangan melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yaitu melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang atau jasa (pasal 17 ayat (1)).

Dalam ayat (2) pasal 17 ditentukan bahwa Pelaku Usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang apabila barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya atau mengakibatkan Pelaku usaha lain tidak dapat masuk kedalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama. Namun demikian pengecualian praktek monopoli ini dapat saja dilakukan oleh suatu lembaga tertentu asalkan ditunjuk oleh Pemerintah yang pelaksanaannya harus ditetapkan dalam bentuk undang-undang dengan mendapat persetujuan DPR.<sup>12</sup>

Adanya Undang-undang No.5 tahun 1999 merupakan tantangan bagi Pegadaian karena selama ini bisa dikatakan sebagai boleh dikatakan pemegang monopoli. Namun apabila dikaji lebih dalam sebenarnya Perum Pegadaian tidak berkedudukan sebagai pemegang monopoli, karena telah banyak lembaga perbankan/jasa keuangan lain dalam menjalankan usahanya yang menerapkan sistem gadai dalam skim kreditnya.

Walaupun untuk kondisi sekarang masih sebagai market leader, tetapi rasa was-was kalah bersaing dengan pelaku pasar lainnya itu tetap ada apalagi bilamana formula usaha jasa gadai ini juga diberikan kepada pihak swasta

---

<sup>12</sup>*Ibid,*

sebagaimana rencana Pemerintah hendak meluncurkan Undang-undang jasa gadai.

Adanya Rancangan Undang-Undang Jasa gadai tersebut secara langsung merupakan ancaman bagi Pegadaian, karena tidak menutup kemungkinan akan tumbuh menjamur diberbagai tempat lembaga-lembaga keuangan yang melakukan usaha atau bisnis serupa pegadaian. Persaingan akan semakin ketat siapa kuat akan menjadi pemenangnya, dan tidak menutup kemungkinan pihak Swasta akan mengambil alih posisinya (market leader), karena unggul dalam pelayanan terutama dari segi harga yang lebih rendah dari Pegadaian.

Dalam RUU tersebut ditentukan bahwa bentuk hukumnya adalah Perseroan terbatas (PT) dan Perusahaan Umum (Perum). Status PT sebagaimana dimaksud dalam U.U.No.1 tahun 1995 didirikan dengan tujuan untuk mencari keuntungan semata, berbeda halnya dengan Perum yang juga dibebani tugas sosial. Tidaklah fair apabila kedua badan hukum tersebut harus berkompetisi dalam lingkup bisnis yang sama. Status PT secara teoritis akan lebih efisien pengelolaannya karena dapat berkonsentrasi penuh dalam mencari keuntungan, berbeda halnya dengan status Perum yang notabene adalah Perusahaan milik negara (BUMN). Untuk mengatasi hal itu idealnya memberikan kebijakan khusus apabila Pegadaian masih dikehendaki berstatus Perum, yaitu dengan memberikan dukungan permodalan yang memadai untuk menjalankan fungsi sosialnya.

Dalam RUU Jasa Gadai ditentukan bahwa besarnya Sewa Modal (tarif bunga) ditentukan sendiri oleh Perusahaan, hal ini berarti bahwa setiap badan usaha mempunyai kebebasan dan pasarlah yang akan memberikan penilaian

mampu tidaknya dalam persaingan. Setidaknya Pemodal kuat akan menawarkan jasanya dengan harga relative murah sehingga kondisi demikian akan menyulitkan bagi Perum untuk bersaing. Dengan Perusahaan Swasta pemodal kuat. Posisi Perum sangat dilematis, disatu pihak harus berani bersaing disisi lain kondisi permodalannya kurang mendukung. Bila Pemerintah konsisten sebagai regulator dan sebagai player (Pelaku bisnis) tentunya juga harus konsisten dan fair dalam memperlakukan setiap badan usaha termasuk yang berstatus BUMN dengan memberikan kondisi dan tugas yang sama, atau bila tetap dengan kondisi semula diberikan bantuan penyertaan modal yang memadai.

Dalam sistem gadai sebagaimana dimaksud dalam pasal 1150 KUHPerdara, merupakan hak kebendaan kreditur terhadap benda bergerak yang menjadi obyek jaminan. Kreditur mempunyai hak preference untuk mengambil pelunasan secara didahulukan dari kreditur lainnya apabila pihak debitur ingkar janji tidak melaksanakan pembayaran utangnya. Penyerahan barang sebagai obyek jaminan pada umumnya dilakukan dari tangan ke tangan , yaitu penyerahan (levering) secara kontan dan konkret dari pemberi jaminan (debitur) kepada penerima jaminan (kreditur). Selama ini Pemberi jaminan dianggap sebagai pemilik barang ( pasal 1977 ayat (2) KUHPerdara) padahal dalam praktek tidak selalu demikian .

Pelaksanaan ketentuan pasal 1977 KUHPerdara tersebut masih rawan terhadap unsur pidana, karena sifatnya anggapan sepanjang tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya. Dalam kasus kriminal yang menimpa Pegadaian, sering dituduh sebagai penadah (pasal 480 KUHPidana) karena

menerima barang jaminan berasal dari hasil kejahatan. Dalam praktek tidak semua barang bergerak didukung oleh surat bukti kepemilikan, kecuali kendaraan (motor/mobil) ada BPKBnya, lain halnya dengan bukti kepemilikan benda tetap (tanah/bangunan) yang selalu didukung dengan sertifikat kepemilikan.

Dengan lahirnya Undang-undang No.42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia membawa keluwesan dalam hukum jaminan, terutama gadai, barang tidak perlu lagi diserahkan kepada Kreditur tetapi cukup hak kepemilikannya saja sedangkan obyek jaminan tetap dikuasai oleh Debitur. Untuk melindungi kepentingan Kreditur, maka Debitur diwajibkan melakukan perawatan obyek jaminan dan adanya sanksi pidana bilamana pihak Debitur menyalahgunakan / mengalihkan obyek jaminan.

Sistem jaminan fidusia ini diterapkan oleh Pegadaian dalam skim kredit kreasi (kredit angsuran system fidusia), yang ternyata memperoleh tanggapan positif dari masyarakat. Dana yang disalurkan berasal dari surat utang pemerintah rekening 005 sebesar 200 milyar rupiah Dalam waktu kurang dari setahun sudah terserap 400 milyar rupiah lebih, karena tariff bunganya relatif murah yaitu 12% setahun. Untuk mendanai kredit kreasi ini terpaksa Pegadaian harus mencari dana tambahan dari lembaga perbankan yang tarif bunga bersifat komersiel. Secara bisnis dana talangan dari lembaga perbankan tersebut rugi bila diperuntukkan pendanaan kredit kreasi, namun karena dalam rangka mengemban misi perusahaan maka itu merupakan resiko yang disadari.

Dilapangan ternyata Kredit yang ditujukan untuk sektor usaha mikro formal/informal ini ternyata mampu bersaing dengan paket kredit UMKM yang

disalurkan oleh lembaga perbankan maupun lembaga keuangan BUMN lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa pangsa pasar kredit UMKM masih potensial untuk dikembangkan sebagai amanat dan perwujudan dari misi perusahaan yang digariskan oleh pemerintah.

#### b. Ketentuan Hukum Gadai Syariah

Transaksi gadai menurut syariah haruslah memenuhi rukun dan syarat tertentu, yaitu:

1. Rukun gadai: adanya ijab dan kabul; adanya pihak yang berakad, yaitu pihak yang berakad, yaitu pihak yang menggadaikan (rahn) dan yang menerima gadai (murtahin); adanya jaminan (marhun) berupa barang atau harta; adanya utang (marhun bih).

Dalam fikih empat mashab (fiqh al-madzahib al-arba'ah) digunakan rukun gadai sebagai berikut:

##### a. Aqid (orang yang berakad)

Aqid adalah orang yang melakukan akad yang meliputi dua arah yaitu rahin (orang yang menggadaikan barangnya) dan murtahin (orang yang berpiutang dan menerima barang gadai).

##### b. Ma'qud 'alaih (barang yang di akadkan)

Ma'qud alaih meliputi dua hal yaitu marhun (barang yang di gadaikan) dan marhun bihi (dain), atau utang yang karenanya diadakan akad rahn.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup>Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A., Hukum Gadai Syariah, (Cet 1: Jakarta ; sinar grafika, 2008) h. 20.



2. Syarat sah gadai: rahn dan murtahin dengan syarat-syarat kemampuan juga berarti kelayakan seseorang untuk melakukan transaksi pemilikan, setiap orang yang sah melakukan jual beli sah melakukan gadai. Sighat dengan syarat tidak boleh terkait dengan masa yang akan datang dan syarat-syarat tertentu. Utang (marhun bih) dengan syarat harus merupakan hak yang wajib diberikan atau diserahkan kepada pemiliknya, memungkinkan pemanfaatannya bila sesuatu yang menjadi utang itu tidak bisa dimanfaatkan maka tidak sah, harus dikuantifikasi atau dapat dihitung jumlahnya bila tidak dapat diukur atau tidak dikuantifikasi, rahn itu tidak bisa. Barang (marhun) dengan syarat harus bisa diperjualbelikan, harus berupa harta yang bernilai, marhun harus bisa dimanfaatkan secara syariah, harus diketahui keadaan fisiknya, harus dimiliki oleh rahn setidaknya harus seizin pemiliknya.

Di samping itu, menurut fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 gadai syariah harus memenuhi ketentuan umum berikut:

1. Murtahin (peneri barang) mempunyai hak untuk menahan marhun (barang) sampai semua utang rahn (yang menyerahkan barang) dilunasi
2. Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik rahn. Pada prinsipnya, marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seizin rahn, dengan tidak mengurangi nilai marhun dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan penrawatannya

3. Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban rahn, namun dapat dilakukan juga oleh murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahn
4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman
5. Penjualan marhun
  - a. Apa bila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan rahn untuk segera melunasi utangnya.
  - b. Apabila rahn tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka marhun dijual paksa/dieksekusikan melalui lelang sesuai syariah.
  - c. Hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
  - d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahn dan kekurangannya menjadi kewajiban rahn.

#### **D. Pegadaian dalam Konsep Fiqih**

- a. Rukun dan Syarat gadai.

Transaksi menurut syariah haruslah memenuhi rukun dan syarat tertentu, yaitu:

1. Akad ijab dan kabul, seperti seseorang berkata; “aku gadaikan mejaku ini dengan harga Rp. 10.000,00” dan orang yang satu menjawab. “aku terima gadai mejamu seharga Rp. 10.000,00” atau bisa pula dilakukan selain dengan kata-kata, seperti dengan surat, isyarat, atau yang lainnya.

2. Aqid, yaitu yang menggadaikan (rahin) yang menerima gadai (murtahin).

Adapun syarat bagi yang berakad adalah ahli tasharuf, yaitu mampu membelanjakan harta dan dalam hal ini memahami persoalan-persoalan yang berkaitan dengan gadai.

3. Barang yang dijadikan jaminan (borg), syarat pada benda yang dijadikan jaminan ialah keadaan barang itu tidak rusak sebelum janji utang harus dibayar.

4. Ada utang, disyaratkan keadaan utang telah tetap.<sup>14</sup>

b. Risiko kerusakan marhun.

Bila marhun hilang di bawah penguasaan murtahin, maka murtahin tidak wajib menggantinya, kecuali bila rusak atau hilangnya itu karena kelalaian murtahin atau karna disia-siakan, umpamanya murtahin bermain-main dengan api, lalu terbakar barang gadaian itu, atau gudang t5ak di kunci, lalu barang-barang itu hilang dicuri orang. Pokonya murtahin diwajibkan memelihara sebagaimana layaknya, bila tadak demikian ketika ada cacat atau kerusakan apa lagi hilang, menjadi tanggung jawab murtahin.

Menurut hanafi, murtahin yang memegang marhun menanggung resiko kerusakan marhun atau kehilangan marhun, bila Marhun itu rusak atau hilang baik karna kelalaian maupun tidak. Demikian pendapat Ahmad Azhar Basyir.

c. Penyelesaian Gadai

Untuk menjaga supaya tidak ada pihak yang dirugikan, dalam gadai tidak boleh diadakan syarat-syarat, misalkan ketika akad gadai diucapkan, “apabila rahn

---

<sup>14</sup> Hendi Suhendi, *Op Cit*, h. 107-108.

tidak mampu melunasi utangnya hingga waktu yang telah ditentukan, maka marhun menjadi milik murtahin sebagai pembayaran utang” sebab ada kemungkinan pada waktu pembayaran yang telah ditentukan untuk membayar utang harga marhun akan lebih kecil daripada utang rahin yang harus dibayar, yang mengakibatkan ruginya pihak murtahin. Sebaliknya ada kemungkinan marhun pada waktu pembayaran yang telah ditentukan akan lebih besar jumlahnya daripada utang yang harus dibayar, yang akibatnya akan merugikan pihak rahin.<sup>15</sup>

Apabila pada waktu pembayaran yang telah ditentukan rahin belum membayar utangnya, hak murtahin adalah menjual marhun, pembelinya boleh murtahin sendiri atau yang lain, tetapi dengan harga yang umum berlaku pada waktu itu dari penjualan marhun tersebut. Hak murtahin hanyalah sebesar piutangnya, dengan akibat apabila harga penjualan marhun lebih besar dari jumlah utang, sisanya dikembalikan kepada rahin. Apabila sebaliknya, harga penjualan marhun kurang dari jumlah utang, rahin masih menanggung pembayaran kekurangannya.

#### d. Riba dan Gadai

Perjanjian gadai pada dasarnya adalah perjanjian utang-piutang, hanya saja dalam gadai atau jaminannya, riba akan terjadi dalam gadai apabila dalam akad gadai ditentukan bahwa rahin harus memberikan tambahan kepada murtahin ketika membayar utangnya atau ketika akad gadai ditentukan syarat-syarat, kemudian syarat tersebut dilaksanakan.

---

<sup>15</sup> *Ibid*, h. 109-110

Bila rahin tidak mampu membayar utangnya hingga pada waktu yang telah ditentukan, kemudian rahin menjual marhun dengan tidak memberikan kelebihan harga marhun kepada rahin, maka disini juga telah berlaku riba.

#### **E. Pegadaian dalam Konsep Ekonomi**

Peluang Ekonomi dari Berkembangnya Pegadaian Syariah

1. Selama Pronas ( dulu, Repelita ) diperlukan pembiayaan pembangunan yang seluruhnya diperkirakan akan mencapai jumlah yang sangat besar. Dari jumlah tersebut diharapkan sebagian besar dapat disediakan dari tabungan dalam negeri dan dari dana luar negeri sebagai pelengkap saja. Dari tabungan dalam negeri diharapkan dapat dibentuk melalui tabungan pemerintah yang kemampuannya semakin kecil dibandingkan melalui tabungan masyarakat yang melalaui sektor perbankan dan lembaga keuangan lainnya.
2. Mengingat demikian besarnya peranan yang diharapkan dari tabungan masyarakat melalaui sector perbankan maka perlu dicarikan berbagai jalan dan peluang untuk mengerahkan dana dari masyarakat. Pegadaian berfungsi mencairkan ( dishoarding ) simpanan-simpanan berupa perhiasan dan barang tidak produktif yang kemudian diinvestasikan melalui mekanisme pinjaman mudharabah.
3. Adanya pegadaian syariah yang telah disesuaikan agar tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku akan memperkaya khasanah lembaga keuangan di Indonesia.
4. Konsep pegadaian syariah yang lebih mengutamakan kegiatan produksi dan perdagangan serta kebersamaan dalam hal investasi, menghadapi resiko usaha

dan membagi hasil usaha, akan memberikan sumbangan yang besar kepada perekonomian Indonesia khususnya dalam menggiatkan kegiatan investasi, penyediaan kesempatan kerja dan pemerataan pendapatan.

Dari Uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa mengingat pegadaian syariah adalah sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam, maka perusahaan gadai dengan system ini akan mempunyai segmentasi dan pangsa pasar yang baik sekali di Indonesia. Dengan sedikit modifikasi dan penyesuaian dengan ketentuan hukum yang berlaku, peluang untuk dapat dikembangkannya pegadaian syariah cukup besar.<sup>16</sup>



---

<sup>16</sup> <https://ieonline.erahn-pegadaian-islam.html.com>

## **BAB III**

### **METODELOGI PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang mengungkap situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan data dan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi yang alamiah.

#### **B. Teknik Penentuan Lokasi**

##### **1. Waktu Penelitian**

Penelitian terhadap Peranan PT. Pegadaian (Persero) Cab. Takalar dalam meningkatkan ekonomi umat di Kab. Takalar. Dilaksanakan mulai tanggal 10 agustus 2012 sampai dengan tanggal 29 september 2012.

##### **2. Tempat Penelitian**

Tempat penelitian dipilih secara sengaja (purposive) yaitu berlokasi di PT. Pegadaian (Persero) Cab. Takalar yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana Peranan PT. Pegadaian (Persero) Cab. Takalar dalam meningkatkan ekonomi umat di Kab. Takalar.

#### **C. Metode Pendekatan**

Pendekatan Syari'at yaitu dalam membahas skripsi ini penulis mempergunakan Al-Qur'an dan Hadist Nabi Muhammad Saw sebagai rujukan pertama.

Pendekatan Sosiologis yaitu suatu pendekatan dengan jalan melihat gejala-gejala sosial yang kemungkinan terjadi dan dapat mempengaruhi terjadinya aksi dalam interaksi antara anggota masyarakat sosial.

#### **D. Metode Pengumpulan Data**

Setiap penelitian cukup banyak cara yang digunakan sebagai alat pengukuran data-data yang telah ditemukan dalam penelitian lapangan.

Data-data yang diukur pada penelitian tersebut adalah data primer berupa penelitian langsung ditemukan atau diperoleh pada objek penelitian. Demikian pula data sekunder selaku data pendukung yang didapat seperti melalui penelitian dokumentasi.

Adapun dalam pengumpulan data, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

##### **1. Kajian Pustaka (Library Research)**

Pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan pengkajian dan pencatatan terhadap berbagai literatur yang hubungannya dengan permasalahan yang dibahas, baik terhadap buku, majalah dan dokumen-dokumen yang tertulis yang biasanya didapatkan melalui perpustakaan atau tempat di mana terdapat buku-buku serta sumber-sumber lain.

Pengukur penelitian perpustakaan ini dilakukan secara:

- a) Kutipan Langsung, yaitu penulis secara langsung dari suatu buku atau karya ilmiah tanpa mengubah kata-kata dalam tulisan dikutip



b) Kutipan Tidak Langsung, yaitu penulis mengutip suatu pendapat dengan merubah redaksi, ulasan, dan uraian-uraian sehingga terdapat perbedaan dengan aslinya namun maksud dan tujuannya sama.

2. Penelitian Lapangan (Field Research) yaitu penulis mengadakan penelitian di lapangan untuk mendapatkan data-data konkrit yang ada kaitannya dengan skripsi ini. Dalam pengumpulan data di lapangan lewat metode ini, penulis menggunakan tehnik-tehnik sebagai berikut:

a) Observasi

Observasi dalam kamus besar Bahasa Indonesia berarti pengamatan atau peninjauan secara cermat. Sedangkan para ahli memberikan pemahaman observasi sebagai berikut:

Alwasilah C. menyatakan bahwa, observasi adalah penelitian atau pengamatan sistematis dan terencana yang diniati untuk perolehan data yang dikontrol validitas dan reliabilitasnya.

Syaodih N. Mengatakan bahwa, observasi (*observation*) atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung.

Dari semua pendapat tersebut terdapat suatu kesamaan pemahaman bahwa observasi adalah pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian.<sup>1</sup>

b) Wawancara (*Interview*)

---

<sup>1</sup> Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Cet. 2; Bandung: ALFABETA cv, 2010) h. 104-105

Wawancara atau interview adalah suatu bentuk komunikasi verbal semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi.<sup>2</sup> Melaksanakan teknik wawancara berarti melakukan interaksi komunikasi atau percakapan antara pewawancara (*interviewer*) dan terwawancara (*interviewee*) dengan maksud menghimpun informasi dari interviewee.<sup>3</sup> Adapun yang penulis wawancarai dalam penelitian ini adalah pihak dari Manager Dompot Dhuafa dan Penerima manfaat yang dianggap perlu dalam melengkapi data penulis.

Dalam wawancara pertanyaan dan jawaban diberikan secara verbal. Biasanya komunikasi ini dilakukan dalam keadaan saling berhadapan, namun komunikasi dapat juga dilaksanakan melalui telepon. Hubungan antara penginterview dan yang diinterview bersifat sementara, yaitu berlangsung dalam jangka waktu tertentu dan kemudian diakhiri. Hubungan dalam interview biasanya seperti antara orang asing yang tak berkenalan, namun pewawancara harus mampu mendekati responden, sehingga ia rela memberikan keterangan yang kita inginkan.<sup>4</sup>

Wawancara dapat digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan peneliti berkeinginan untuk mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan informan lebih mendalam. Sebagai pegangan peneliti dalam penggunaan metode interview adalah bahwa subjek adalah informan yang tahu tentang dirinya sendiri, tentang tindakannya secara ideal yang akan diinformasikan secara

---

<sup>2</sup>S. Nasution, *Metode Penelitian: Penelitian Ilmiah*, (Ed.1. cet. 10; Jakarta: Bumi Aksara, 2008) h. 113

<sup>3</sup> Djam'an Satori dan Aan Komariah, *op cit.*, h. 129

<sup>4</sup> S. Nasution, *op cit.*.

benar dan dapat dipercaya. Dengan demikian dapat mengadakan wawancara atau interview pada prinsipnya merupakan usaha untuk menggali keterangan yang lebih dalam dari sebuah kajian dari sumber yang relevan yang berupa pendapat, kesan, pengalaman, pikiran dan sebagainya.<sup>5</sup> Dalam interview peneliti menerima informasi yang diberikan oleh informan tanpa membantah, mengecam, menyetujui, atau tidak menyetujuinya. Dengan interview peneliti bertujuan untuk memperoleh data yang dapat diolah untuk memperoleh generalisasi atau hal-hal yang bersifat umum yang menunjukkan kesamaan dengan situasi-situasi lain.<sup>6</sup>

Sebelum melakukan wawancara, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Kemukakan maksud wawancara dalam rangka tujuan penelitian dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti.
- 2) Penggunaan gaya bicara yang sopan dengan nada dan irama yang menarik tetapi tanpa dibuat-buat atau diusahakan agar pembicaraan dirasakan bebas.

c) Dokumentasi

Teknik pengumpulan data yang juga berperan besar dalam penelitian kualitatif adalah dokumentasi. Dokumentasi dari asal katanya dokumen yang bersal dari bahasa Latin yaitu *docere*, yang berarti mengajar. Dokumen merupakan sumber informasi yang bukan manusia (non human resources). Nasutin, menyebutkan bahwa ada pula sumber non manusia, (non human

---

<sup>5</sup> Djam'an Satori dan Aan Komariah, *op cit.*,

<sup>6</sup> S. Nasution, *op cit.*, h. 114

resources) diantaranya dokumen, foto, dan bahan statistik. Secara bebas dapat diterjemahkan bahwa dokumen merupakan rekaman kejadian masa lalu yang ditulis atau dicetak, dapat berupa catatan anekdot, surat, buku harian dan dokumen-dokumen. Dokumen kantor termasuk lembaran internal, komunikasi bagi publik yang beragam, file siswa dan pegawai, deskripsi program dan data statistik pengajaran.

Gottschalk mengungkapkan bahwa para ahli sering mengartikan dokumen dalam dua pengertian, yaitu pertama, sumber tertulis bagi informasi sejarah sebagai kebalikan dari pada kesaksian lisan, artefak, peninggalan-peninggalan terlukis, petilasan-petilasan arkeologis. Kedua, diperuntukkan bagi surat-surat negara seperti surat perjanjian, undang-undang, hibah, konsesi dan lainnya. Dokumen dalam pengertiannya yang lebih luas menurut Gottschalk dapat berupa setiap proses pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apapun, baik itu yang bersifat tulisan, lisan, gambaran, atau arkeologis. Dalam kepentingan penelitian, orang membutuhkan dokumen sebagai bukti otentik dan mungkin juga menjadi pendukung suatu kebenaran.<sup>7</sup>

#### **E. Metode Pengolahan Data dan Analisis Data**

Setelah data terkumpul secara keseluruhan baik data kepustakaan maupun data lapangan maka selanjutnya mengolah data dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif dengan memberikan gambaran yang jelas dengan menggunakan metode sebagai berikut:

---

<sup>7</sup> Djam'an Satori dan Aan Kpmariah, *op cit.*, h. 146-147

1. Metode Induktif yaitu suatu metode analisis atau teknik penelitian yang bertitik tolak pada data-data yang bersifat khusus lalu pada yang bersifat umum.
2. Metode deduktif yaitu metode analisis data yang bertitik tolak dari satuan-satuan yang bersifat umum kemudian kesimpulan yang bersifat khusus dengan melihat berbagai data baik dari observasi, maupun wawancara.
3. Metode komparatif yaitu metode analisis data di mana membandingkan antara pendapat satu dengan pendapat yang lain kemudian mengambil kesimpulan sendiri.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum PT. Pegadaian Cab. Takalar**

##### **1. Sejarah PT. Pegadaian**

Lembaga kredit dengan sisten gadai pertama kali hadir di bumi nusantara pada saat VOC berkuasa, adapun institusi yang menjalankan usaha ini adalah Banh Van Leching. Band ini didirikan melalui surat keputusan Gubernur Jendral Van Imhoff tanggal 28 agustus 1746 dengan modal sebesar (f 7.500.000) yang terdidri dari modal VOC 2/3 dan sisanya milik swasta.

Tahun 1800 POC bubar dan kekuasaan di Indonesia diambil Alih oleh Belanda, semasa pemerintahan Deandels dikeluarkan peraturan tentang macam barang yang dapat diterima sebagai jaminan gadai seperti perhiasan, kain, dan lain-lain.

Tahun 1811 kekuasaan di Indonesia diambil alih oleh Inggris- Rafles selaku penguasa mengeluarkanperaturan dimana setiaporang yang dapat mendirikan Bank Van Learning asal mendapat izin penguasa setempat, yang disebut Lisentiestsel. Lisentiestsel ini ternyata tidak menguntungkan pemerintah. Tahun 1811 Lisentiestsel di hapuskan, dan diganti dengan Pachstelsel yang dapat didirikan oleh anggota masyarakat umum dengan syarat sanggup membayar sewa dengan tinggi kepada pemerintah.<sup>1</sup>

Tahun 1816 Belanda kembali menguasai Indonesia, Pachstelsel makin berkembang, namun berdasarkan penelitian pemerintah ternyata banyak

---

<sup>1</sup> Nurul huda dkk, *lembaga keuangan islam*. Cet 1,( jakarta: kencana 2010).h. 275-276

Pachstelsel yang melakukan perbuatan sewenang-wenang, seperti menaikkan suku bunga, memiliki barang jaminan yang kadaluarsa karena tidak melelangnya, membayar uang kelebihan kepada yang berhak.

Dengan adanya kekurangan tersebut tahun 1870 Pachstelsel dihapuskan dan diganti lagi dengan Licentiestelsel, dengan maksud untuk mengurangi pelanggaran yang merugikan masyarakat umum dan pemerintah. Usaha ini tidak berhasil, karena ternyata penyelewengan masih berjalan tanpa menghiraukan peraturan pemerintah sehingga timbul kehendak pemerintah untuk menguasai sendiri badan usaha ini.

Tahun 1900 diadakan penelitian untuk maksud tersebut dan berkesimpulan bahwa badan usaha tersebut cukup menguntungkan. Maka didirikan Pilot Project di Suka Bumi, atas keberhasilan proyek ini dikeluarkan STBL No. 131 tanggal 1 April 1901 sebagai Pegadaian Negeri pertama di Indonesia, tanggal 1 april inilah kemudian dijadikan hari lahirnya pegadaian. Pada mulanya uang pinjaman yang diberikan kepada peminjam berjumlah f 300 dan tidak dikenakan ongkos administratif. Karena pegadaian negeri ini semakin berkembang dengan baik maka dikeluarkan peraturan monopoli, diantaranya STBL No. 749 tahun 1914 dan STBL No. 28 tahun 1921. sanksi terhadap pelanggaran peraturan monopoli diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana pasal 509. berdasarkan STBL No.266 tahun 1930. Pegadaian Negeri dijadikan perusahaan Negara seperti yang dimaksudkan dalam pasal 2 pada Indonesia Bedrijvenwet STBL No. 419 tahun 1927.

Proklamasi kemerdekaan RI mengakibatkan pengalihan penguasaan terhadap Pegadaian Negara, yaitu kepada Pemerintahan RI melalui Peraturan Pemerintah No.176 tahun 1961, maka tanggal 1 Januari 1967 Pegadaian Negara dijadikan Perusahaan Negara dan berada dalam lingkup Departemen Keuangan. Perusahaan Pegadaian Negara ini mengalami kerugian, untuk itu dikeluarkan instruksi Presiden No. 17 tahun 1969, Undang-undang No.9 tahun 1969 dan Peraturan Pemerintah No.17 tahun 1969 dan pelaksanaannya. Menurut surat keputusan Menteri Keuangan RI No.Kep.664/MK/9/1969,yang mulai berlaku 1 Mei 1969, perusahaan pegadaian negara menjadi jawatan pegadaian.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1990, Perjan Pegadaian diubah menjadi perusahaan umum Pegadaian, dengan status PERUM Pegadaian diharapkan mampu mengelola usahanya secara profesional, berwawasan bisnis oriental tanpa meninggalkan misinya yaitu pertama turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan dan kebijaksanaan dan program pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai, kedua mencegah timbulnya praktek ijon, pegadaian gelap, riba dan pinjaman tidak wajar lainnya.

Kantor cabang mengadakan transaksi dengan para nasabah, melaksanakan pencatatan dan selanjutnya mengirimkan laporannya ke kantor daerah. Sedangkan kantor daerah diberi otorisasi penuh untuk mengelola dan mengawasi setiap operasional cabang oleh kantor pusat.

**Adapun Visi dan Misi PT. Pegadaian Cab. Takalar yaitu :**

**a. Visi :**



Pada tahun 2003 pegadaian “Champion” dalam pembiayaan mikro dan kecil berbasis gadai dan fiducia bagi masyarakat menengah kebawah.

**b. Misi :**

1. Membantu program pemerintah meningkatkan kesejahteraan rakyat khususnya, golongan menengah kebawah dengan memberikan solusi keuangan yang terbaik melalui penyaluran pinjaman kepada usaha mikro dan kecil.
2. Memberikan manfaat kepada pemangku kepentingan dan melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik secara konsisten.
3. Melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya.

**2. Struktur Organisasi PT. Pegadaian**



### **3. Tugas dan Fungsi Keorganisasian**

Tugas dan fungsi dari tiap-tiap bagian organisasi PT. Pegadaian (Persero)

Cab. Takalar :

a. Pimpinan Cabang Utama

Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan kegiatan operasional, administrasi dan keuangan Kantor Cabang serta Unit Pelayanan Cabang (UPC).

b. Pimpinan Cabang Kelas 1

Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan kegiatan operasional, administrasi dan keuangan Kantor Cabang Unit Pelayanan Cabang (UPC).

c. Manajer Operasional Usaha Gadai

Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengawasi penetapan taksiran barang jaminan, penetapan besaran uang pinjaman, keuangan, serta administrasi usaha gadai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

d. Manajer Operasional Usaha Lain

Merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi kegiatan , penetapan kelayakan kredit, keuangan, keamanan serta pembuatan laporan kegiatan operasional usaha lain Kantor Cabang.

e. Pemimpin Cabang Kelas II

Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan kegiatan operasional, administrasi dan keuangan Kantor Cabang serta Unit Pelayanan Cabang (UPC).

f. Pemimpin Cabang Kelas II

Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan kegiatan operasional, administrasi dan keuangan Kantor Cabang serta Unit Pelayanan Cabang (UPC).

g. Manajer Operasional

Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengawasi penetapan taksiran serta penetapan besaran uang pinjaman produk-produk usaha lain dan usaha gadai.

h. Pengelola UPC

Mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengawasi kegiatan kegiatan operasional, mengawasi administrasi, keuangan, keamanan, ketertiban, dan kebersihan serta pembuatan laporan kegiatan Unit Pelayanan Cabang (UPC).

i. Penaksir

Melaksanakan kegiatan penaksiran barang jaminan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penetapan taksiran dan uang pinjaman yang wajar dan citra baik perusahaan, serta mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengawasi kegiatan administrasi dan keuangan.

j. Penyimpanan

Mengurus gudang penyimpanan barang jaminan emas dan dokumen kredit dengan cara menerima, menyimpan, merawat, dan mengeluarkan serta mengadministrasikan barang jaminan emas dan dokumen sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka ketertiban dan keamanan serta kebutuhan barang jaminan emas dan dokumen kredit.

k. Pemegang gudang

Melakukan pemeriksaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pengeluaran serta pembukuan barang jaminan gudang (selain barang kantong) sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka ketertiban dan keamanan serta keutuhan barangjaminan.

l. Pendukung Adm. dan Pembayaran

Mendukung tugas penaksiran dalam hal penerimaan, penyimpanan, dan pembayaran uang serta melaksanakan tugas administrasi keuangan di Kantor Cabang, sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan operasional Kantor Cabang dan UPC.

m. Fungsional Usaha Lain

Merencanakan, mengorganisasikan, dan menyelenggarakan kegiatan operasional usaha lain di Kantor Cabang dan UPC.

n. Layanan Konsumen

Memberikan informasi dan saran kepada nasabah yang merasa tidak puas terhadap segala kegiatan operasional Kantor Cabang.

**B. Hasil Penelitian di PT. Pegadaian (Persero) Cab. Takalar.**

Dalam hal ini penulis telah melakukan penelitian di PT. Pegadaian (Persero) Cab. Takalar. Dan telah melakukan wawancara kepada Pimpinan Cabang dan nasabah yang ada di kantor Pegadaian Cab. Takalar. Hasil penelitian yang telah di peroleh adalah sebagai berikut :

**1. Peran PT. Pegadaian dalam meningkatkan perekonomian Ummat di Kab. Takalar.**

Di dalam hidup ini adakalanya orang mengalami kesulitan pada suatu ketika. Untuk menutupi (mengatasi) kesulitan itu terpaksa meminjam uang kepada pihak lain, apakah kepada rumah penggadaian atau kepada perorangan. Pinjaman ini harus disertai dengan jaminan.

Setiap pemberi pinjaman haruslah mempunyai keyakinan bahwa peminjam juga memiliki keyakinan bahwa peminjam dapat membayar kembali uang yang telah dipinjamkan. Karena sejak zaman dahulu, pemberi pinjaman tidak pernah lagi menaruh kepercayaan penuh kepada peminjam hanya berdasarkan perjanjian berdasarkan lisan untuk itu harus ada tanggungan yang jelas yang dapat meringankan beban pemberi pinjaman apabila peminjaman gagal memenuhi tanggung jawabnya.

Pegadaian merupakan salah satu soko guru perekonomian nasional yang diharapkan dapat membantu pemerintah dalam mensukseskan usaha pemerataan pembangunan, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, sangat membantu program pengentasan kemiskinan, terutama pada masa sekarang ini. Kredit dengan sistem gadai dirasa sangat sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia dan merupakan alternatif ideal terutama bagi golongan menengah kebawah. Untuk itu pegadaian dituntut lebih profesional dalam memberikan jasa pelayanan kepada nasabah yang kian meningkat jumlahnya, dengan dukungan suatu sistem informasi yang baik. Perum Pegadaian khususnya Cabang Takalar menawarkan jasa pelayanan yang diantaranya adalah pemberian kredit dengan tanpa meninggalkan ciri khusus dan misinya yaitu penyaluran pinjaman atau kredit atas dasar hukum gadai. Dalam pemberian jasa tersebut tidak lepas dari

aktivitas pencatatan dan pengolahan data. Data diolah meliputi data-data pemberian dan pelunasan kredit yang tentunya melibatkan dokumen-dokumen yang penting khususnya bagi nasabah sendiri maupun bagi Pegadaian guna proses pengolahan data. Hal ini menjadi masalah karena pihak Pegadaian khususnya Cabang Takalar harus menangani sekian banyak data baik data nasabah sendiri beserta barang yang dijadikan agunan sampai transaksi yang dilakukan dan kemudian memprosesnya secara berulang-ulang sampai menjadi laporan, sehingga apabila masih menggunakan cara konvensional atau manual tentu akan memakan waktu yang lama dan kemungkinan kesalahan relatif tinggi.

Menurut Andi Fibrianto, SE. Selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Cab. Takalar dalam wawancaranya menjawab sebagai berikut :

Dalam meningkatkan perekonomian pegadaian memberikan penyaluran gadai kepada masyarakat untuk membangun usaha (jual barang campuran, pakaian, dan modal usaha lainnya) dengan harapan agar masyarakat dapat lebih meningkatkan taraf hidupnya dan keluarga.<sup>2</sup>

Pegadaian turut serta membantu pemerintah dalam melaksanakan pembangunan dibidang perekonomian, terutama membantu dalam hal menyediakan atau memberikan pendanaan untuk dijadikan sebagai modal dalam melakukan usaha yaitu lewat jasa gadai sedangkan atribut lain adalah jasa penaksiran barang , jasa penitipan barang dan toko emas. Salah satu tantangan dari perkembangan Pegadaian adalah bagaimana meningkatkan pelayanan untuk mempertahankan loyalitas konsumen.

---

<sup>2</sup> Andi Fibrianto, SE. Selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cab. Takalar., 19-September-2012, 10:20 Wita.

Pegadaian mempunyai peranan penting dalam penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai kepada masyarakat. Oleh karena itu, dalam rangka upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan pengembangan usaha diperlukan dana yang cukup besar. Sumber dana yang selama ini dipergunakan untuk keperluan penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai berasal dari dana intern Perusahaan dan pinjaman dari lembaga keuangan masih belum mencukupi, maka diperlukan dana dari sumber lain yang sah.

Menurut Pimpinan Cabang PT. Pegadaian yaitu sebagai berikut :

Upaya yang dilakukan perusahaan untuk memperoleh nasabah yaitu dengan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan sosialisasi peran pegadaian, melalui iklan di TV, Radio, koran dan lain-lain, menyebar brosur, melakukan kegiatan sosial dan memberikan sumbangan.<sup>3</sup>

Loyalitas nasabah merupakan hal yang sangat penting kaitannya dengan pengembangan usaha. Nasabah yang mempunyai loyalitas yang tinggi akan senantiasa menggunakan produk atau jasa yang disediakan perusahaan, tidak akan terpengaruh jasa yang ditawarkan pihak lain, dan ketika terdapat hal hal yang tidak mereka sukai akan memberitahukan kepada penyedia jasa dan tidak memberitahukannya kepada orang lain.

Loyalitas nasabah dipengaruhi oleh kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan sangat penting kaitannya dengan eksistensi dan perkembangan keberhasilan perusahaan jasa. Kualitas pelayanan akan berpengaruh pada kepuasan nasabah yang pada akhirnya akan berdampak pada loyalitas nasabah pada penyedia jasa tersebut.

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, 10:27 Wita

Wawancara berikutnya penulis berhasil mewawancarai beberapa nasabah pada PT. Pegadaian (Persero) Cab. Takalar sebagai berikut:

Menurut Daeng Caya selaku nasabah di PT. Pegadaian (persero) Cab. Takalar. Bahwa pegadaian sangat membantu kebutuhannya selama menjadi nasabah baik dalam memberikan dana pinjaman untuk modal usaha dan pendidikan untuk anak-anaknya karena pegadaian tidak memberikan kesulitan yang memberatkan bagi kami.<sup>4</sup>

Wawancara berikutnya dengan Nasabah yang bernama Samsia, nasabah tersebut mengatakan telah lama menjadi nasabah di PT. Pegadaian (Persero) Cab.

Takalar. Dan menurutnya :

Pegadaian telah banyak membantu saya, modal yang saya ambil dari pegadaian adalah modal awal saya mendirikan usaha untuk menjual barang campuran. Sampai saat ini setiap saya membutuhkan modal yang sangat mendesak saya selalu datang ke Pegadaian karena prosedurnya yang sangat mudah dan Cepat sehingga tidak butuh waktu lama untuk mendapatkan uang pinjaman.<sup>5</sup>

Selanjutnya penulis mewawancarai nasabah lainnya yang bernama Abdul Basir, ia mengatakan bahwa:

Pegadaian memberikan bantuan yang sangat berarti buat kami, karena di saat kami membutuhkan dana yang mendesak pegadaian siap melayani kami dan prosesnya juga sangat cepat. Namun disisi lain kami merasa terbebani karena harus membayar bunga dengan jangka waktu yang sangat sempit. Tapi sadar bahwa itu adalah resiko buat kami.<sup>6</sup>

Pegadaian merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diharapkan dapat membantu pemerintah dalam pembangunan nasional, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan perkreditan pada

---

<sup>4</sup> Daeng Caya, Selaku Nasabah di PT. Pegadaian (Persero) Cab. Takalar , 20-September-2012, 09:45 Wita.

<sup>5</sup> Samsia, Selaku Nasabah di PT. Pegadaian (Persero) Cab. Takalar, 03-November-2012, 09:16, Wita.

<sup>6</sup> Abdul Basir, Selaku Nasabah di PT. Pegadaian (Persero) Cab. Takalar , 03-November-2012, 10:05, Wita.



Pegadaian dapat dilakukan oleh siapapun baik perseorangan maupun antar badan usaha.

Bank dan Lembaga Keuangan lainnya juga memberikan secara khusus perkreditan dan bergerak di bidang perkreditan dan pembiayaan yang merupakan badan usaha yang bersifat formal. Pada Perum Pegadaian, untuk mendapatkan kredit atau pencairan kredit bisa dikatakan sangat mudah dibandingkan badan usaha yang bersifat formal seperti Bank dan Lembaga Keuangan lainnya, karena di Perum Pegadaian hanya dalam waktu kurang dari dua puluh menit masyarakat sudah bisa mendapatkan pencairan kredit dan dengan persyaratan yang bisa dikatakan sangat mudah yang tidak berbelit-belit yaitu adanya identitas diri yang bisa berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Kuasa dari pemilik barang jika di kuasakan, Surat Izin Mengemudi (SIM), Pasport, kartu pengenalan lainnya yang telah ditentukan oleh Perum Pegadaian, adanya barang yang akan dijaminkan atau digadaikan untuk mendapatkan Uang Pinjaman (UP) dan menandatangani perjanjian kredit pada Surat Pengambilan Kredit (SBK) tanpa di survei langsung ke lapangan untuk program atau produk Kredit Cepat Aman (KCA).

Dari hasil wawancara di atas baik dengan pimpinan maupun nasabah penulis dapat menyimpulkan bahwa pegadaian sampai saat ini masih sangat berperan penting dalam membantuh kebutuhan masyarakat khususnya masyarakat kab. Takalar yang memiliki perekonomian menengah kebawah. Karena pegadain mampu memberikan pinjaman dari yang terkecil Rp. 50.000,00 sampai terbesar yang dibutuhkan nasabah dengan persyaratan yang sangat memudahkan nasabah.

## **2. Faktor-faktor yang mendorong dan menghambat Pegadaian dalam meningkatkan perekonomian di Kab. Takalar.**

Pegadaian merupakan salah satu solusi dan pilihan bagi masyarakat dalam mendapatkan pendanaan dengan cara mudah cepat. Kemudahan proses pendanaan itulah yang menjadikan pegadaian menjadi dekat dengan masyarakat.

"Selama ini pegadaian memang menjadi solusi bagi masyarakat yang memerlukan uang, sesuai dengan tagline pegadaian, yaitu memberikan solusi tanpa masalah. Apalagi prosesnya cukup cepat, dan hanya 15 menit proses bisa selesai.

Tidak heran kemudahan pelayanan tersebut menjadi perhatian dari masyarakat, sehingga hal tersebut mendorong pertumbuhan jumlah nasabah pegadaian. Selama ini jumlah nasabah di pegadaian terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Bahkan pada tahun 2012 jumlahnya telah mencapai 1,39 juta nasabah, padahal pada tahun 2011 jumlahnya hanya mencapai sekitar 1,1 juta nasabah atau mengalami peningkatan sekitar 129 persen.

Selama ini pegadaian memang terus berupaya untuk mengoptimalkan layanannya kepada masyarakat. Salah satunya dengan cara memperluas jaringan dengan membuka layanan kantor atau outlet baru.

Kemudahan layanan pegadaian diakui oleh masyarakat. Seperti halnya yang diungkapkan ibu ati, warga Buah sangrobone Takalar. Menurutnya, pegadaian memang selalu menjadi solusi saat dirinya kesulitan keuangan. Karena saat dirinya membutuhkan uang, khususnya untuk kebutuhan biaya untuk mendirikan usaha nya ia memperoleh sebagian modalnya dari pegadaian, ia bisa

mengandalkan pegadaian sebagai solusinya. Di sana ia bisa menggadaikan perhiasannya dan mendapatkan uang.

"Ya kalau butuh uang langsung saja ke pegadaian, selain bunganya rendah, prosesnya pun cepat. Dan itu bisa ditebus kapan saja," katanya.

Pegadaian sebagai lembaga perkreditan milik pemerintah tentunya mempunyai kelebihan maupun kekurangannya.

Adapun kelebihan-kelebihan tersebut antara lain:

1. Persyaratan ringan dan mudah.
2. Prosedurnya sederhana.
3. Tidak dipungut biaya administrasi.
4. Tidak perlu membuka rekening seperti tabungan, deposito ataupun giro.
5. Suatu saat uang dibutuhkan, saat itu juga uang dapat diperoleh.
6. Keanekaragaman barang yang dapat dijadikan jaminan.
7. Angsuran ringan karena tidak ditentukan besarnya, sehingga dapat diangsur sesuai kemampuan.
8. Penetapan bunga dengan sistem bunga menurun. Jadi bunga dibebankan atas dasar sisa pinjaman.
9. Apabila telah jatuh tempo pinjamannya dan hutang pokok belum dapat dibayar, maka jangka waktu pinjaman dapat diperpanjang, dengan membayar bunga lebih dahulu.
10. Memperoleh tenggang waktu pelunasan 2 minggu setelah jatuh tempo tanpa dibebani bunga (masa tunggu lelang).

Adapun kelemahan Pegadaian yaitu:

1. Sewa modal Pegadaian relatif lebih tinggi dari tingkat suku bunga perbankan;
2. Harus ada jaminan berupa barang bergerak yang mempunyai nilai;
3. Barang bergerak yang digadaikan harus diserahkan ke Pegadaian, sehingga barang tersebut tidak dapat dimanfaatkan selama digadaikan; dan
4. Jumlah kredit gadai yang dapat diberikan masih terbatas

Selain itu Menurut Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Cab. Takalar bahwa yang menjadi faktor pendorong nasabah melakukan transaksi gadai yaitu sebagai berikut :

prosedurnya mudah, cepat dan aman. Pegadaian juga dapat memberikan pinjaman kepada nasabah dengan nominal yang begitu kecil, dibandingkan tempat atau perusahaan lain yang biasanya memberikan pinjaman pada masyarakat.<sup>7</sup>

Kesulitan apa saja yang biasanya dialami oleh nasabah dalam pengembalian barang jaminan ?

Menurut Rianti. P, SE selaku Penaksir di PT. Pegadaian Persero Takalar bahwa kesulitan yang biasanya dialami nasabah dalam pengembalian barang jaminan yaitu :

Terkadang nasabah datang tidak membawa kartu identitas dan SBK (surat bukti kredit) biasa juga orang yang menggadaikan dengan yang menebus barang gadai berbeda. Tetapi hal tersebut tidak jadi masalah jika nasabah memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh pegadaian. Akan tetapi syarat utama dalam proses pengembalian barang jaminan harus disertai kartu

---

<sup>7</sup> Andi Fibrianto, SE. Selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cab. Takalar., 19-September-2012, 10:36 Wita.

identitas, ini merupakan suatu pencegahan atau keamanan yang diberikan perusahaan agar tidak terjadi suatu masalah antara kedua belah pihak.<sup>8</sup>

Kemudian wawancara berikutnya dilanjutkan oleh penulis “Adakah kira-kira hambatan bagi pegadaian dalam memberikan pelayanan kepada nasabah?

Menurut Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Cab. Takalar. Yaitu :

Yang menjadi penghambat bagi pegadaian belakangan ini adalah modal, mengingat pegadaian juga memperoleh modal dari Bank. Dan persaingan sekarang terlalu ketat karena banyaknya penyaluran gadai dimana-mana. Tetapi diluar itu semua kami berusaha memberikan pelayanan kepada nasabah sebaik mungkin agar mereka menjadi nyaman selama menjadi nasabah di pegadaian ini.<sup>9</sup>

Sopan santun dalam memberikan pelayanan kepada nasabah adalah hal yang harus ada dan dimiliki oleh pegawai perum pegadain. Selain itu,

1. Berprilaku adil

Dalam memberikan jasa pelayanan, perilaku adil terhadap pelanggan wajib hukumnya. Sikap adil termasuk diantara nilai-nilai yang telah ditetapkan oleh islam dalam aspek ekonomi.

2. Bersikap melayani dan rendah hati

Sikap merupakan sikap utama dari seorang pegawai dalam memberikan pelayanannya kepada pelanggan. Sikap melayani dan rendah hati yang melekat dalam diri seorang pegawai tercermin dengan kemampuan berkomunikasi dengan baik. Upaya merebut hati nasabah dengan memberi perhatian berkomunikasi yang sopan, ramah serta murah senyum sehingga bisa membuat pelanggan senang. Sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW:

---

<sup>8</sup> Rianti. P, SE selaku Penaksir di PT. Pegadaian (Persero) Cab. Takalar. 19-September-2012, 11:15 Wita.

<sup>9</sup> Andi Febrianto SE *Op Cit*, 10:45 Wita.

“Dari Jabir bin Abdullah ra. Bahwasanya Rosululloh Saw bersabda: Allah menyayangi seorang yang bermurah ahti ketika menjual, ketika membeli dan ketika menegadakan penagihan”. (HR. Bukhori)

### 3. Amanah (menepati janji)

Berarti memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan kewajiban. Amanah ditampilkan dalam ketepatan janji dengan keterbukaan, kejujuran, pelayanan yang optimal dan berbuat yang terbaik. Dalam segala hal, setiap amanah harus dimiliki oleh setiap orang mukmin, apalagi yang memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan pelayanan bagi masyarakat.

### 4. Jujur dan tepercaya

Sikap jujur dan tepercaya adalah sikap yang harus menghiasi seseorang dalam setiap gerak-geriknya adalah kejujuran. Disinilah islam menjelaskan bahwa kejujuran sangat penting perannya. Setiap orang yang menjelaskan usahanya haruslah jujur, tidak pernah berdusta dalam melakukan transaksi. termasuk memberikan jasa pelayanan kepada setiap pelanggan.

“Adakah syarat-syarat khusus yang diberikan pegadaian kepada nasabah sebelum melakukan transaksi gadai ?

Menurut Rianti P. SE selaku Penaksir di PT. Pegadaian Cab. Takalar Sebenarnya tidak ada, nasabah cukup membawa kartu identitas dan barang yang akan digadaikan saja. Karena pegadaian sebisa mungkin memberikan kemudahan dan kenyamanan buat nasabahnya dan tidak berbelit-belit.<sup>10</sup>

Dikatakan sangat mudah yang tidak berbelit-belit yaitu adanya identitas diri yang bisa berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Kuasa dari pemilik barang jika di kuasakan, Surat Izin Mengemudi (SIM), Pasport, kartu pengenalan lainnya yang telah ditentukan oleh Perum Pegadaian, adanya barang yang akan

---

<sup>10</sup> Rianti P SE, *Op Cit.* 11:30

dijaminkan atau digadaikan untuk mendapatkan Uang Pinjaman (UP) dan menandatangani perjanjian kredit pada Surat Pengambilan Kredit (SBK) tanpa di survei langsung ke lapangan untuk program atau produk Kredit Cepat Aman (KCA).

Berapa nominal terkecil dan nominal terbesar yang dapat diberikan oleh pegadaian kepada nasabah ?

Nominal terkecil yaitu Rp. 50.000,00 – Rp. 500.000,00 dan nominal terbesar Rp. 100.000.000,00. Tetapi untuk memberikan kredit sebesar itu perusahaan memberikan sedikit syarat khusus yang harus dipenuhi oleh nasabah, untuk menghindari hal-hal yang mungkin terjadi di kemudian hari.<sup>11</sup>

Dari beberapa hasil wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa faktor utama yang menjadi pendorong nasabah dalam melakukan transaksi di Pegadaian Cab. Takalar adalah prosedurnya yang mudah, Cepat dan aman dan dapat meminjam uang dengan nominal terkecil dibandingkan ditempat atau perusahaan lainnya tidak ada yang mampu melayani nasabah untuk memberikan pinjaman sekecil itu. sehingga nasabah merasa nyaman di tambah pelayanan karyawan yang sangat bersahabat dan menghormati nasabahnya menjadi salah satu faktor yang membuat pegadaian tetap bertahan ditengah persaingan pemberi jasa pinjaman yang saat ini sangat banyak.

Namun meski begitu sebagai perusahaan milik negara Pegadaian juga memiliki hambatan atau kekurangan, namun tidak begitu berarti, hambatan-hambatan itu seperti sewa pinjaman yang relatif lebih tinggi dibandingkan bank,

---

<sup>11</sup> *Ibid*, 11:45

dan harus memiliki barang jaminan berupa barang bergerak. Tetapi hal ini bukanlah masalah yang berarti bagi nasabah.

Berikut ini adalah tabel mengenai data statistik perusahaan tentang peningkatan kredit, pelunasan, pelelangan, dan sisa barang yang belum ditebus, dari tahun ke tahun yang disajikan dalam tabel dibawah ini:

**Tabel 1.1**  
**Data Statistik Perusahaan, Kredit**  
**Di PT. Pegadaian Cab. Takalar Tahun 2006-2011**

No	Tahun	Kredit	
		BJ	UP
1.	2006	44,0s04	29,201,229,000
2.	2007	49,382	37,814,016,000
3.	2008	55,987	55,742,621,000
4.	2009	53,224	67,100,268,000
5.	2010	49,549	74,946,643,000
6	2011	44,091	83,194,740,000

**Sumber data statistik perusahaan (kredit) PT. Pegadaian (persero) Cab. Takalar, 22-september-2012. 10:25 wita.**

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa pada tahun 2006 BJ (jaminan) sebanyak 44,004 dan UP (uang pinjaman) sebesar Rp. 29.201,229.000,00. Tahun 2007 BJ (Barang jaminan) 49.382 dan UP (uang pinjaman)Rp. 37.814.016.000,00. Tahun 2008 BJ(barang jaminan) 55,987 UP (uang pinjaman) Rp. 55.742.621.000,00. Tahun 2009 BJ (barang jaminan) 53,224 UP (uang pinjaman) Rp. 67.100.268.000,00. Tahun 2010 BJ (barang jaminan) 49,549, UP (uang pinjaman) Rp. 74.956.643.000,00. Tahun 2011 BJ (barang jaminan) 44,091. UP (uang pinjaman) Rp. 83, 194.740.000,00.

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa meningkatnya UP (uang pinjaman ) menunjukkan bahwa nasabah sangat tertolong dengan adanya lembaga pegadaian



didaerahnya, olehnya itu secara otomatis dapat kita simpulkan bahwa lembaga pegadaian memiliki peran yang dalam menyelesaikan masalah ekonomi dimasyarakat.

**Tabel 1.2**  
**Data Statistik Perusahaan, Pelunasan**  
**Di PT. Pegadaian Cab. Takalar Tahun 2006-2011**

No	Tahun	Pelunasan	
		BJ	UP
1.	2006	43,535	27.659.248.000
2.	2007	47,708	35.591.552.000
3.	2008	53,298	50.412.095.000
4.	2009	53,885	63.368.320.000
5.	2010	49.063	71.396.727.000
6.	2011	45,029	79.607.726.000

**Sumber data statistik perusahaan (pelunasan) PT. Pegadaian (persero) Cab. Takalar, 22-september-2012. 10:25 wita.**

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa pelunasan pada tahun 2006 BJ (barang jaminan) sebanyak 43,535, UP (uang pinjaman) Rp. 27.659.248.000,00. Tahun 2007 BJ (barang jaminan) sebanyak 47,708. UP (uang pinjaman) Rp. 35.591.552.000,00. Tahun 2008 BJ (barang jaminan) 53,298, UP (uang pinjaman) Rp. 50.412.095.000,00. Tahun 2009 BJ (barang jaminan) 53,885 UP (uang pinjaman) Rp. 63.368.320.000. Tahun 2010 BJ (barang jaminan) 49,063 UP (uang pinjaman) Rp. 71.396.727.000. tahun 2011 BJ (barang jaminan) 45,029 UP (uang pinjaman) Rp. 79.607.726.000,00.

Dengan melihat data yang peneliti sajikan dalam tabel diatas secara umum menggambarkan bahwa kebutuhan masyarakat akan adanya lembaga pegadain sangat tinggi dibuktikan dengan adanya peningkatan uang pinjaman dari tahun ketahun, hal ini juga menandakan bahwa tingkat ekonomi masyarakat semakin

membaik dengan tingginya uang pinjaman yang diambil berarti dapat dipastikan bahwa para nasabah juga mempunyai kemampuan yang sama untuk mengembalikan uang tersebut.

**Tabel 1.3**  
**Data Statistik Perusahaan, Pelelangan**  
**Di PT. Pegadaian Cab. Takalar 2006-2011**

No.	Tahun	Lelang	
		BJ	UP
1.	2006	513	163.481.000
2.	2007	394	136.332.000
3.	2008	216	95.185.000
4.	2009	481	287.591.000
5.	2010	915	692.423.000
6.	2011	673	637.570.000

**Sumber data statistik perusahaan (pelelangan) PT. Pegadaian (persero) Cab. Takalar, 22-september-2012. 10:25 wita.**

Tabel 1.3 menjelaskan bahwa pada tahun 2006 pelelangan BJ 513. UP Rp. 163.481.000. pada tahun 2007 BJ 394. UP Rp. 136.332.000. pada tahun 2008 BJ 216 UP Rp. 95.185.000. pada tahun 2009 BJ 481 UP Rp. 287.591.000. Tahun 2010 BJ 915 UP Rp. 692.423.000. Tahun 2011 BJ 673 UP Rp. 637.570.000.

**Tabel 1.4**  
**Data Statistik perusahaan, Sisa yang Belum di Tebus**  
**Di PT. Pegadaian Cab. Takalar, Tahun 2006-2011**

No	Tahun	Sisa yang Belum ditebus	
		BJ	UP
1.	2006	11,387	7.862.000.000
2.	2007	12,667	9.948.132.000
3.	2008	15,106	15.165.289.000
4.	2009	13,749	18.221.338.000
5.	2010	13,258	21.045.399.000
6.	2011	11,647	23.994.843.000

**Sumber data statistik perusahaan (sisa yang belum ditebus) PT. Pegadaian (persero) Cab. Takalar, 22-september-2012. 10:25 wita.**

Tabel 1.4 menunjukkan bahwa pada tahun 2006 sisa yang belum ditebus BJ sebanyak 11,387 UP sebesar Rp. 7.862.000.000. pada tahun 2007 BJ 12,667. UP Rp. 9.948.132.000. tahun 2008 BJ 15,106 UP Rp. 15.165.289.000. tahun 2009 BJ 13,749 UP Rp. 18.221.338.000. Tahun 2010 BJ 13,256 UP Rp. 21.045.399.000. 2011 BJ 11,647. UP Rp. 23.994.843.000.

**Tabel 1.5**  
**Data statistik rekapitulasi perbandingan dari tahun 2006-2011**  
**Di PT. Perum pegadaian Cab. Takalar.**

Tahun	Kredit		Pelunasan		Lelang		Sisa yang belum ditebus	
	BJ	UP	BJ	UP	BJ	UP	BJ	UP
2006-2007	5,378	8,612,787,000	4,173	7,932,304,000	119	27,149,000	1,280	2,086,132,000
2007-2008	6,605	17,928,605,000	5,590	14,820,543,000	178	41,147,000	2,439	5,217,157,000
2008-2009	2,763	11,357,647,000	587	12,956,225,000	265	192,406,000	1,357	3,056,049,000
2009-2010	3,675	7,846,375,000	4,822	8,028,407,000	434	404,832,000	491	2,824,061,000
2010-2011	5,458	8,248,097,000	4,034	8,210,999,000	242	54,853,000	1,611	2,949,444,000

**Sumber data statistik (rekapitulasi perbandingan) perusahaan ( PT.**  
**Pegadaian (persero) Cab. Takalar, 22-september-2012. 10:25 wita.**

Tabel 1.5 menunjukkan rekapitulasi perbandingan (selisih) dari tahun 2006-2007 kredit BJ 5,378 UP Rp. 8.612.787.000. Pelunasan pada tahun 2006-2007 BJ 4,173. UP Rp. 7.932.304.000. Pelelangan pada tahun 2006-2007 BJ 119 UP Rp. 27.149.000. sisa yang belum ditebus pada tahun 2006-2007 BJ 1,280 UP Rp. 2.086.132.000. pada tahun 2007-2008 kredit BJ 6,605 UP Rp. 17.928.605.000. pelunasan pada tahun 2006-2007 BJ 5,590 UP Rp. 14.820.543.000. pelelangan pada tahun 2007-2008 BJ 178 UP Rp. 41.147.000. sisa yang belum ditebus pada tahun 2007-2008 BJ 2.439 UP Rp. 5.217.157.000. pada tahun 2008-2009 pelunasan BJ 2,763 UP Rp. 11.357.647.000. Pelunasan BJ

587. UP Rp. 12.956.225.000. pevelangan BJ 265. UP Rp. 192.406.000 . sisa yang belum dilunasi BJ 1,357 UP Rp. 3.056.049.000. pada tahun 2009-2010 selisi kredit BJ 3,675 UP Rp. 7.846.375.000, pelunasan BJ 4,822 UP Rp. 8.028.407.000. pevelangan BJ 434 UP Rp. 404.832.000. sisa yang belum ditebus BJ 491 UP Rp. 2.824.061.000. Pada tahun 2010-2011 selisi kredit BJ 5,458 UP Rp. 8.248.097.000. pelunasan BJ 4,034 UP Rp. 8.210.999.000, Pevelangan BJ 242 UP Rp. 54.853.000. sisa yang belum ditebus BJ 1,611 UP Rp.2.949.444.000.

Dari tabel-tabel di atas menunjukkan bahwa Peranan PT. Pegadaian Cab. Takalar sangat membantu kebutuhan masyarakat Kab.Takalar terutama masyarakat menengah kebawah dalam memenuhi kebutuhan mereka, meskipun terjadi penurunan jumlah nasabah, namun hal tersebut tidak menjadi masalah yang berarti karena sampai saat ini PT. Pegadaian Cab. Takalar masih sangat berperan bagi siapa saja yang membutuhkan. Ini menandakan bahwa lembaga pegadaian mempunyai kedudukan yang penting baik untuk membantu kebutuhan masyarakat ekonomi lemah maupun membantu dalam proses peningkatan ekonomi masyarakat. Olehnya itu diperlukan pelayanan yang baik dari pihak lembaga pegadaian dan kerja sama yang baik pula dari para nasabah sehingga masalah kebutuhan ekonomi dapat terpenuhi dengan baik.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Dalam meningkatkan perekonomian ummat di kab. Takalar pegadaian memberikan kemudahan dalam prosedur pemberian kredit kepada nasabahnya, meskipun dalam jumlah nasabah setiap tahunnya mengalami naik turun, namun sejauh ini pegadaian masih sangat berperan dalam membantu meringankan kebutuhan dan masalah-masalah yang di alami masyarakat kab. Takalar khususnya masyarakat yang perekonomiannya menengah ke bawah. Selain itu pegadaian juga berusaha memberikan pelayanan sebaik mungkin karena Kualitas pelayanan sangat penting kaitannya dengan eksistensi dan perkembangan keberhasilan perusahaan jasa. Kualitas pelayanan akan berpengaruh pada kepuasan nasabah yang pada akhirnya akan berdampak pada loyalitas nasabah pada penyedia jasa tersebut.

Yang membuat PT. Pegadaian (Persero) Cab. Takalar masi tetap bertahan dengan bunga yang diberlakukan adalah prosesnya sangat cepat mudah dan aman sehingga nasabah lebih cendrung melakukan transaksi gadai karena pegadaian mampu memberikan pinjaman dengan nominal yang sekecil mungkin. Selama ini pegadaian memang menjadi solusi bagi masyarakat yang memerlukan uang, sesuai dengan tagline pegadaian, yaitu memberikan solusi tanpa masalah. Apalagi prosesnya cukup cepat, dan hanya 15 menit proses bisa selesai.

2. Tidak heran kemudahan pelayanan tersebut menjadi perhatian dari masyarakat, sehingga hal tersebut mendorong pertumbuhan jumlah nasabah pegadaian.

Ada pun yang menghambat pegadaian dalam meningkatkan perekonomian adalah selain bunga yang relatif lebih tinggi dan jangka waktu yang relatif singkat juga karena sekarang perusahaan yang menawarkan jasa gadai juga sudah banyak.

**B. SARAN**

1. Dana yang diberikan oleh pegadaian agar dipergunakan dengan sebaik mungkin.
2. Pegadaian harus sesekali memberikan pelatihan-pelatihan kepada nasabah dan para karyawannya, agar lebih fokus dan mengerti dalam mengelola dana yang disalurkan kepadanya.
3. Kepada calon peneliti, akan dapat mengembangkan serta memperkuat hasil penelitian ini dengan cara mengkaji terlebih dahulu dan mampu mengadakan penelitian yang lebih sukses.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali , H. Zainuddin, M.A., 2008, *Hukum Gadai Syariah*, (Cet, 1), Jakarta: sinar Grafika.
- Antonio Muhammad Syafi'i 2001, *Bank Syariah*. (Cet 1) Jakarta: Gema Insani.
- Departmen Agama Repoblik Indonesia, 1989. *Al-Quran dan Terjemahannya*, Jakarta: CV.Toha Putra Semarang.
- Edwin Mustafa Nasution dkk, 2010. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Cet 3) Jakarta: Kencana.
- Hasan M. Ali, 2003, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Cet 1) Jakarta : Raja Wali Pers.
- <http://nizarakbar.blogspot.com/2012/05/pengertian-dan-definisi-ekonomi-menurut.html>.
- <http://www.uu-anti-monopoli-dan-peran-pegadaian.html>
- [http://www.Dr. M. Quraish Shihab, M.A. /Umat.html](http://www.Dr.M.QuraishShihab,M.A./Umat.html)
- <http://www.fajar.co.id/read-20121009192113-pertumbuhan-ekonomi-takalar-lampau-capaian-nasional>
- <http://www.pkesinteraktif.com/edukasi/opini/3159-mewujudkan-kemandirian-ekonomi-umat.htm>
- <https://ieonline.erahn-pegadaian-islam.html.com>
- Huda Nurul dkk, 2010, *Lembaga Keuangan Islam*. (Cet 1) Jakarta: Kencana.
- Kasmir, 2001, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Cet : 5) Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Komariah Aan dan Satori Djam'an, 2010, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Cet. 2) Bandung: ALFABETA CV.
- Martono, 2002, *Bank dan Lembaga Lainnya*, Yogyakarta : Ekonisia.

Mas'adi Gufron A. M.Ag., *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Cet 1), Jakarta: PT. Raja Grafindo.

Muslehuddin DR. Muhammad, Ph.D, 2004, *Sistem Perbankan Dalam Islam*, (Cet 3) Jakarta : Rineka Cipta.

Rahman Rudy, 2009, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Makassar.

S. Nasution, 2008, *Metode Penelitian: Penelitian Ilmiah*, Ed.1. (Cet. 10) Jakarta: Bumi Aksara.

Soemitra Andri, 2010 *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Cet 2) Jakarta : Kencana.

Suhendi Hendi, 2010, *Fiqh Muamalah*, (Cet 5) Jakarta: Rajawali Pers.

